

LAPORAN AKHIR

KAJIAN MODEL KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DALAM PEMANFAATAN DANA DESA DI KABUPATEN KONAWE



Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Swakelola (SPK)

Nomor: 074/05/SPK/Balitbang/VI/2023


Dr. Liwaul, S.Sos, M.Si, Dkk.

**LPPM UNIVERSITAS HALU OLEO
BEKERJASAMA
BALITBANG KABUPATEN KONAWE
TAHUN 2023**


HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR

1. Judul : **Kajian Model Komunikasi Pembangunan dalam Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Konawe**
2. Ketua Tim Pengusul
 - a. Nama : Dr. Liwaul, S.Sos, M.Si
 - b. NIP : 197712312005011005
 - c. Jabatan/Golongan : Lektor /Penata TK I, III/d
 - d. Program Studi : Administrasi Bisnis
 - e. Perguruan Tinggi : Universitas Halu Oleo
 - f. Bidang Keahlian : Administrasi Publik
3. Anggota Tim Pengusul :
 - a. Nama Anggota I/Keahlian : Dr. Harnina Ridwan, S.IP, M.Si / Ilmu Komunikasi
 - b. Nama Anggota II/Keahlian : Dr. Ambo Wonua Nusantara, SE, M.Si /Ilmu Ekonomi
 - c. Nama Anggota III/Keahlian : Irmawati, S.I.Kom, M.I.Kom /Ilmu Komunikasi
 - d. Nama Anggota IV/Keahlian : Candra Puspita Ningtyas, S.AB, M.AB /Adm. Bisnis
4. Mitra Kerjasama : Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Konawe
5. Jangka Waktu Pelaksanaan : 4 (Empat Bulan)
6. Jumlah Anggaran : Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
7. Sumber Dana : APBD Kabupaten Konawe Tahun 2023

Penanggung Jawab,
Ketua LPPM UHO,


Dr. H. La Aba, S.Si, M.Si
NIP. 196912311997031011

Kendari, Oktober 2023
Ketua Tim,


Dr. Liwaul, S.Sos, M.Si
NIP. 197712312005011005

SAMBUTAN

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas nikmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Penelitian Kerjasama "Kajian Model Komunikasi Pembangunan dalam Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Konawe" ini dapat disusun dan diselesaikan. Kegiatan dapat terlaksana atas kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Konawe melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kabupaten Konawe dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo.

Hasil penelitian LPPM UHO ini, dapat dijadikan sebagai input dalam mengelola dan mencari solusi atas pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dari aspek komunikasi pembangunan. Kami sangat mengapresiasi hasil penelitian ini, semoga dapat menjadi rujukan bagi instansi terkait, seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, BPKAD, Bappeda, Kelembagaan Desa, Pemdamping Desa, Masyarakat Desa secara holistik; sehingga akan terumuskan arah kebijakan pembangunan desa di Kabupaten Konawe.

Pada kesempatan ini Badan Litbang Kabupaten Konawe mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada tim peneliti LPPM Universitas Halu Oleo yang telah bersedia dan bekerjasama untuk melaksanakan kajian/penelitian tentang "Kajian Model Komunikasi Pembangunan dalam Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Konawe".

Besar harapan kami semoga kajian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang bermanfaat dalam Pemerintah Daerah dan Seluruh Masyarakat Kabupaten Konawe. Terima kasih.

Unaaha, Oktober 2023

Kepala Badan Litbang Kabupaten Konawe

Hj. Riny Andriani, SP, M.Si
NIP. 197911192010012013

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama Penyusun mengucapkan puji dan syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan Rahmat-NYA maka penelitian Kerjasama yang berjudul "Kajian Model Komunikasi Pembangunan dalam Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Konawe, dapat terselesaikan.

Penelitian ini dilaksanakan selama 4 (empat) bulan dengan mengambil lokasi di 5 Kecamatan dan puluhan di Kabupaten Konawe. Pemilihan lokasi berdasarkan karakteristik potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, akses pemanfaatan dana desa, potensi-potensi pembangunan, kelembagaan ekonomi desa, dan partisipasi Masyarakat desa dalam mendukung program Pembangunan desa.

Kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar tentunya berkat bantuan berbagai pihak, oleh karena itu, kami mengucapkan penghargaan serta ucapkan setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Halu Oleo atas rekomendasi dan kebijakan penelitian bermitra dengan lembaga eksternal termasuk badan penelitian dan pengembangan di kabupaten/kota Se-Sultra.
2. Kepala Badan Litbang Kabupaten Konawe, atas kesedian bekerjasama dan dukungan anggaran untuk bekerjasama dengan kami sebagai tim peneliti Universitas Halu Oleo.
3. Ketua LPPM Universitas Halu Oleo, atas petunjuk, bimbingan dan surat kuasa untuk melaksanakan kegiatan penelitian ini sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Instansi terkait seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten dan Instansi teknis lainnya, yang telah memberikan data sekunder dan data primer terkait dengan kebijakan pembangunan desa di Kabupaten Konawe.
5. Para Camat dan Kepala Desa yang telah bersedia menjadi *key informan*; kemudian para perangkat desa, para kepala BPD, para pengelola program dana desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh adat,

tokoh pemuda, tokoh perempuan, para pendamping desa, dan seluruh warga yang telah memberikan data dan informasi untuk suksesnya kegiatan mulai dari pengumpulan data lapangan, analisis data, pembuatan laporan dan diseminasi hasil penelitian.

6. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah membantu kelancaran penelitian dan penyusunan laporan ini.

Kami menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan- masukan demi perbaikan laporan ini. Demikian dan terima kasih.

Kendari, Oktober 2022
Ketua Tim Peneliti,

Dr. Liwaul, S.Sos, M.Si

DAFTAR ISI

Contents	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR BAGAN.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Sasaran penelitian.....	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Komunikasi Pembangunan.....	7
2.2. Konsep Pembangunan Berkelanjutan.....	14
2.3. Konsep Dana Desa.....	56
BAB III METODE PENELITIAN.....	65
3.1 Waktu dan lokasi Penelitian.....	65
3.2 Jenis Penelitian.....	65
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	66
3.4. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	66
3.5. Jenis Data Penelitian.....	67
3.6. Tehnik Penarikaninforman Penelitian.....	67
3.7. Organisasi dan Personil.....	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Konawe.....	69
4.2 Potensi Pembangunan di Kabupaten Konawe.....	72
4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan atau pembangunan	

Desa/Kelurahan di Kabupaten Konawe	88
4.4 model komunikasi pembangunan dalam pemanfaatan dana desa di Kabupaten Konawe	107
BAB V PENUTUP	113
5.1 Kesimpulan	113
5.2 Rekomendasi	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN.....	127

DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Ekosistem pertanian.....	26
Bagan 2: Model analisis pariwisata sulaeman.....	46
Bagan 3: Model komunikasi pembangunan di Kabupaten Konawe.....	118

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian	65
Table 4.2 Faktor factor pembangunan	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kabupaten Konawe	69
Gambar 2. Potret panen padi di Kabupaten Konawe	74
Gambar 3. Kebun Kakao di Kabupaten Konawe	76
Gambar 4. Pemberian bantuan alat tangkap di Kecamatan Soropia.....	77
Gambar 5. Pemberian Bebek itik kepada masyarakat	78
Gambar 6. Perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Konawe	80
Gambar 7. Pantai Toronipa di Kecamatan Soropia.....	82
Gambar 8. Pulau Bokori	84
Gambar 9. Puncak Ahuawali.....	86
Gambar 10. Perusahaan tambang di Kabupaten Konawe	87
Gambar 11. Output dana desa di Kabupaten Konawe	108
Gambar 12. Penyulingan nilam usaha bumdes	109
Gambar 13. Drainase di kabupaten konawe.....	111
Gambar 14. Lapangan Sepak Bola.....	112
Gambar 15. Irigasi di Kabupaten Konawe	114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi pembangunan adalah komunikasi usaha yang terorganisir untuk menggunakan proses komunikasi dan media dalam meningkatkan taraf sosial dan ekonomi, yang secara umum berlangsung dalam negara yang sedang berkembang. Komunikasi pembangunan dapat terjadi di semua tingkatan, mulai khalayak bawah hingga pemerintah dan negara, dan termasuk narasumber dan musyawarah kelompok di lembaga resmi. Oleh karena itu, pengembangan komunikasi pembangunan ialah inovasi yang dialami rakyat melalui jalan komunikasi. Komunikasi pembangunan menjadi ilmu dan praktik komunikasi di negara yang sedang maju.

Komunikasi pembangunan bertujuan untuk mempromosikan perkembangan manusia. Memprioritaskan komunikasi pembangunan adalah kegiatan yang mendidik dan memotivasi masyarakat, daripada memberikan laporan dan pernyataan fakta yang tidak realistis. Maksud dari sebuah komunikasi pembangunan ini adalah menegakkan ide dan perilaku moral untuk mengarahkan kapasitas yang dibutuhkan. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan tidak terlepas dari partisipasi, karena pembangunan partisipatif berintikan pada suatu kondisi dimana masyarakatlah yang menjadi aktor utamanya, atau masyarakatlah yang harus memahami sendiri tantangan dan masalah yang dihadapinya dan masyarakat itulah sendiri yang paling utama harus merancang dan melaksanakan upaya dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengatasinya. Dengan demikian masyarakat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pembangunan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa alam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tersebar dalam beberapa bidang pelaksanaan pembangunan, yaitu a). Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain: tambatan perahu jalan pemukiman; jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian; pembangkit listrik tenaga mikrohidro; lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa. 2). Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: air bersih berskala Desa; sanitasi lingkungan; 3). Pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa. 4). Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: taman bacaan masyarakat; pendidikan anak usia dini; balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya.

Salah satu komunikasi pembangunan yang dapat digunakan adalah komunikasi pemerintah dengan penguatan terhadap masyarakat desa atau kegiatan kegiatan yang mampu meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam mencari informasi melalui teknologi. Selanjutnya menjadi wadah komunikasi bagi pemerintah dan masyarakat. Dalam komunikasi Pembangunan, pemerintah mampu menyediakan sarana informasi mengenai seluruh akses yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam proses pengelolaan petensi sumber daya yang dimiliki termasuk

juga dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan. Salah satu contoh pemanfaatan dana desa adalah pada sektor pertanian di Kabupaten Konawe; melalui pemilihan bibit unggul dan bermutu tinggi yang menggunakan dana desa, kemudian dikelola oleh petani untuk dikembangkan setelah itu dikembalikan ke desa untuk dipasarkan sehingga dana desa mengalami perputaran dan dapat menghasilkan keuntungan.

Berdasarkan hal di atas, dibutuhkan kemampuan pengelola dana desa dan desa itu sendiri dalam pemasaran dan pencarian informasi mengenai pertanian. Selain itu dengan dana desa inovasi teknologi juga dapat dijangkau para warga tani dapat menemukan teknologi pertanian yang baru yang dapat mengefisienkan waktu ketika digunakan. Hal ini sejalan dengan teori modernisasi yang di definisikan sebagai proses di mana individu-individu mengalami perubahan gaya hidup dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern dilakukan dengan model komunikasi pembangunan.

Desa merupakan penunjuang perkembangan daerah yang besar, Jika sebuah desa berhasil berproses dan mandiri maka hal tersebut menunjukkan keberhasilan bagi sebuah daerah. Kabupaten Konawe juga merupakan salah satu daerah yang selalu mendapatkan dana desa untuk setiap kecamatan. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe menunjukkan pada tahun 2022, terdapat 291 desa di Kabupaten Konawe mendapatkan alokasi dana desa yang cukup besar. Dana desa merupakan dana yang di berikan pemerintah dan dapat di kelola dengan mandiri oleh sebuah desa. Pemanfaatan dana Desa dengan tepat dapat menjadi solusi dalam peningkatan pembangunan termasuk pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu di butuhkan inovasi melalui model komunikasi pembangunan yang berkelanjutan sebagai upaya pemanfaatan dana desa yang lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana gambaran potensi pembangunan di Kabupaten Konawe?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengembangan pembangunan di Kabupaten Konawe?
3. Bagaimana model komunikasi pembangunan dalam pemanfaatan dana desa di Kabupaten Konawe?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dilaksanakannya penelitian model komunikasi pembangunan dalam pemanfaatan dana desa di Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi pembangunan di Kabupaten Konawe
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan pembangunan di Kabupaten Konawe
3. Untuk menghasilkan sebuah model komunikasi pembangunan dalam pemanfaatan dana desa di Kabupaten Konawe

Sedangkan tujuan penelitian ini akan menjadi bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Konawe dalam pengembangan pembangunan melalui pemanfaatan dana desa yang tepat.

1.4 Sasaran penelitian

Adapun sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Teridentifikasi dan diketahui gambaran potensi pembangunan di Kabupaten Konawe.
2. Teridentifikasi dan diketahui faktor apa yang mempengaruhi pengembangan pembangunan di Kabupaten Konawe.
3. Terbentuknya sebuah komunikasi pembangunan dalam pemanfaatan dana desa di Kabupaten Konawe.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian pengembangan melalui model komunikasi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan persiapan. Kegiatan ini meliputi sarana persiapan administrasi dan teknik, termasuk perekrutan tenaga pelaksana.
2. Survei dan pengumpulan data. Kegiatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi, memahami karakteristik lokasi penelitian berikut populasi/ subyek dan atau sampel penelitian.
3. Pengolahan data dan analisis data. Kegiatan ini meliputi: inventarisasi, pengujian data, analisis data, dan penyajian hasilnya yang melibatkan tenaga ahli sesuai bidang kajian studi.
4. Analisa dan perumusan hasil penelitian dan kesimpulan. Kegiatan ini menggunakan bantuan tenaga ahli dan profesional.
5. Pelaporan dan Rekomendasi. Kegiatan ini dilakukan dalam tiga tahap, yakni:
(1) Penyusunan dan penggandaan laporan interim (awal) berisi tentang progres dan metode report studi;

(2) Laporan kemajuan studi berupa hasil pengumpulan data dan pembahasan hasil analisis sementara, dan

(3) Laporan akhir dan seminar hasil penelitian, tentang hasil studi secara komprehensif termasuk rekomendasi hasil studi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Komunikasi Pembangunan

Berdasarkan pandangan dan realitas komunikasi pembangunan, menurut beberapa ahli pada umumnya sehingga konsep komunikasi pembangunan dapat diringkas menjadi dua aspek pemahaman. Pemahaman yang luas dan sempit (Dilla, 2007: 116).

1. Pengertian Dalam Arti Luas

Dalam pengertian luas, pendekatan yang berbeda dapat dikategorikan dari berbagai bidang yang membahas masalah hubungan dan interaksi antara komunikasi dan pembangunan. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa komunikasi pembangunan berarti mencakup fungsi komunikasi seperti kegiatan untuk berbagi catatan antara masyarakat dan pemerintah, dimulai dengan perencanaan pembangunan, implementasi, dan proses evaluasi.

2. Pengertian Dalam Arti sempit

Dalam arti sempit, defenisi komunikasi pembangunan adalah semua upaya, metode, dan teknik untuk memberikan gagasan dan keterampilan pengembangan yang dimulai dari pengembangan ke komunitas sasaran sehingga mereka memiliki pemahaman terkait dengan komunikasi pembangunan yang dilakukan. Upaya untuk proses komunikasi pembangunan sebagai upaya untuk menjalankan potensi pembangunan untuk mengkomunikasikan pembangunan kepada masyarakat, di mana masyarakat berpartisipasi untuk mendapat manfaat dari kegiatan pembangunan. Upayaupaya ini termasuk penelitian, analisis, promosi, dan evaluasi teknologi komunikasi di semua aktivitas pembangunan yang dilakukan.

2.1.1 Unsur-unsur Komunikasi Pembangunan

Menurut Hafied Cangara (2015:326) unsur-unsur dalam komunikasi pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Komunikator

Komunikator pembangunan ialah mereka yang menyebarkan hal-hal baru (inovasi) kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat melaksanakan hal itu demi peningkatan taraf hidupnya.

b. Pesan

Maksud dari pesan pada proses komunikasi ialah suatu hal yang diberikan komunikator terhadap komunikan. Pesan bisa diutarakan melalui proses empat mata ataupun memakai media komunikasi, yang didalamnya berisi ilmu pengetahuan, informasi, nasihat, hiburan maupun persuasi.

c. Media atau saluran

Media atau saluran komunikasi adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan atau menyebarkan. Alat atau saluran komunikasi sosial bisa berupa media tradisional, Komunikasi massa, Komunikasi sosial, dan media online (cyber media). Dalam konteks pembangunan komunikasi pembangunan, saluran atau media komunikasi banyak digunakan mulai dari yang tradisional, media arus utama sampai pada media baru (cyber media).

d. Khalayak

Khalayak adalah individu, lembaga, organisasi, keluarga, kelompok atau komunitas suatu masyarakat yang menjadi sasaran informasi.

e. Efek

Pengaruh atau efek ialah perbedaan antara apa yang di pikirkan, dirasakan dan di lakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan.

f. Umpan Balik

Umpan balik (feedback) adalah reaksi yang di berikan oleh khalayak kepada komunikator akibat penerimaan informasi. Umpan balik sangat penting karena menjadi alat ukur berhasil tidaknya komunikasi yang dilakukan.

g. Lingkungan

Lingkungan, situasi, kondisi, dan tempat merupakan hal penting yang tidak bisa diabaikan dalam proses komunikasi. Dalam konteks komunikasi pembangunan adalah mereka-mereka yang memerlukan bantuan penyadaran, pengetahuan, keterampilan, dan fasilitas yang mereka gunakan untuk meningkatkan taraf hidupnya sehingga menjadi individu atau keluarga yang sejahtera dari perspektif ekonomi.

2.1.2 Peran Komunikasi Pembagunan

Menurut Dilla (2007:124-125). Banyaknya penasfsiran tentang peranan komunikasi pembagunan dalam pembagunan, mendorong Hebebro (1979) (dalam Nasution, 2004) menyusun peran yang biasa dilakukan komunikasi dalam pembagunan, yakni:

1. Komunikasi dapat menciptakan iklim perubahan dengan membujukkan nilai-nilai, sikap, mental, dan bentuk perilaku yang menunjang modernisasi.
2. Komunikasi dapat mengajarkan keterampilan baru, baca tulis, hingga lingkungan.
3. Media massa dapat bertindak sebagai pengganda sumber-sumber daya pengetahuan.
4. Media massa dpat mengantarkan pengalaman-pengalaman yang seolah-olah dialami sendiri sehingga mengurangi biaya psikis dan ekomis bagi kepribadian.

5. Komunikasi dapat meningkatkan aspirasi yang merupakan perangsang untuk bertindak.
6. Komunikasi membantu masyarakat menemukan norma-norma baru dan keharmonisan dari masa transisi.
7. Komunikasi dapat membuat orang lebih condong untuk berpartisipasi membuat keputusan dalam masyarakat.
8. Komunikasi dapat mengubah struktur kekuasaan pada masyarakat tradisional dengan pengetahuan massa melalui informasi.
9. Komunikasi dapat menciptakan rasa kebangsaan sebagai sesuatu yang mengatasi kesetiaan-kesetiaan lokal.
10. Komunikasi dapat membantu eksistensi mayoritas populasi sebagai warga negara, sehingga membantu meningkatkan aktivitas politik.
11. Komunikasi dapat memudahkan perencanaan dan implementasi program-program pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan penduduk.
12. Komunikasi dapat membuat pembangunan ekonomi, sosial, dan politik menjadi proses yang berlangsung sendiri.

2.1.3 Model Komunikasi Pembangunan

Menurut Dilla (2007:150). Mengutip Pendapat Nasution (2007), terdapat tiga model komunikasi pembangunan, antara lain:

a) Model Komunikasi Linear

Komunikasi linear diartikan sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui saluran (penyaring). Komponen utama model ini adalah pesan, sumber, gateepers, penerima, dan umpan balik.

b) Model Komunikasi Relasional

Komunikasi relasional diartikan sebagai seperangkat aktivitas interaksi yang berpusat pada informasi sebagai bagian dari hubungan sosial tersebut. Komponen utama dari model ini adalah informasi, hubungan baik antar partisipan, dan penerima aktif.

c) Model Komunikasi Konvergen

Komunikasi konvergence diartikan sebagai suatu proses konvergen (memusat) dengan informasi yang disepakati bersama oleh pihak-pihak yang berkomunikasi dalam rangka mencapai saling pengertian (Konsensus).

Komponen utama dari model ini adalah informasi, konvergensi, saling pengertian, kesepakatan bersama, tindakan bersama, dan jaringan hubungan sosial.

2.1.4 Strategi Komunikasi Pembangunan

Memilih strategi komunikasi adalah kunci dan bagian penting dari rencana pembangunan yang akan dilakukan. Setiap strategi memerlukan fokus pada proses utama, dan pendekatan mungkin berbeda tergantung pada situasi dan kondisi. Komunikasi dalam bidang ini dipandang sebagai proses mendapatkan partisipasi dari masyarakat dalam implementasi proses pembangunan. Pemerintah harus selalu melihat strategi mana yang dipakai untuk menyampaikan pesan sehingga sesuai harapan (Dilla, 2007: 131).

Menurut Rogers dalam Efendy (2017) Pembagian strategi komunikasi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Strategi media berdasarkan pengirim pesan

Pengirim pesan yang memakai metode kebanyakan menggolongkan aktivitas sesuai dengan media yang digunakan. Sebenarnya, strategi ini adalah yang termudah,

tentu saja sedikitnya tidak efisien. Strategi media ini biasanya dimulai dengan pertanyaan, "Apa yang bisa anda lakukan dengan radio?" Atau "Bagaimana anda menggunakan TV untuk menyampaikan pesan anda?"

b. Strategi desain instruksional

Para pendidik yang biasanya menggunakan strategi ini. Mereka memfokuskan strategi pada pembelajaran individu yang dimaksud sebagai tujuan mendasar dalam pencapaian komunikasi. Strategi kelompok ini didasarkan pada teori pembelajaran formal dan berfokus pada pendekatan sistem untuk pengembangan bahan pembelajaran. Partisipasi pendidik ini dalam bidang kegiatan ini telah memberi mereka banyak pemahaman tentang penilaian formatif, pengujian, desain program langkah demi langkah, dan banyak lagi.

c. Strategi partisipasi

Prinsip penting dalam mengorganisir kegiatan dalam strategi partisipasi ini adalah kerja sama masyarakat dan pemerintah. Kunci dari strategi ini adalah jumlah informasi yang dipelajari melalui program komunikasi pengembangan atau pembangunan, tetapi pengalaman berpartisipasi secara setara dalam berbagai proses pengetahuan dan keterampilan.

d. Strategi pemasaran

Yang paling biasa dalam strategi ini ialah strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana atau pendekatan yang digunakan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk mempromosikan produk atau layanan mereka kepada target pasar. Strategi pemasaran bertujuan untuk mencapai tujuan bisnis, seperti meningkatkan penjualan, memperluas pangsa pasar, atau membangun kesadaran merek.

2.1.5 Fungsi Komunikasi Pembangunan

Beberapa fungsi komunikasi pembangunan antara lain:

1. Sebagai proses penyebaran informasi dari penerangan kepada masyarakat, titik pandang komunikasi pembangunan difokuskan pada usaha penyampaian dan pembagian (sharing) ide, gagasan, dan inovasi pembangunan antara pemerintah dan masyarakat.
2. Sebagai proses pendidikan dan keterampilan bagi masyarakat, titik pandang komunikasi pembangunan difokuskan pada penyediaan model pembelajaran publik yang murah, dan mudah mendidik, dan mengajarkan keterampilan yang bermanfaat.
3. Sebagai proses rekayasa sosial, komunikasi pembangunan di pandang sebagai bentuk pengembangan tindakan komunikasi yang sistematis, terencana dan terarah, dalam melakukan informasi ide, gagasan atau inovasi melalui informasi yang disebarluaskan dan diterima sehingga menimbulkan partisipasi masyarakat dalam melakukan perubahan.
4. Sebagai proses perubahan perilaku, komunikasi pembangunan di pandang sebagai proses psikologis, proses sebagai tindakan komunikasi yang berkesinambungan, terarah, dan bertujuan.

2.1.6 Tujuan Komunikasi Pembangunan

Aktivitas komunikasi pembangunan yang dilakukan sebagai upaya untuk mendukung aktivitas pembangunan. Dibutuhkan pengembangan sebagai tindakan nyata dalam peningkatan pendapatan rendah dan status sosial ekonomi agar berada pada tingkat yang lebih tinggi dan hal ini menjadi salah satu tujuan dalam pelaksanaan

komunikasi pembangunan. Bentuk gagasan dan keterampilan yang digunakan untuk pencapaian tujuan jangka panjang (Harun dan Ardianto, 2011: 162). Maksud komunikasi pembangunan ialah untuk memperoleh pembentukan berkepanjangan. Pembentukan berharap maka kelompok orang memiliki tingkat-tingkat pendidikan beserta pendapatan yang minimal sehingga mendukung upaya peningkatann kualitas atau kondisi ekonomi dan dapat secara terbuka menerima informasi mengenai perkembangan pembangunan.

2.2. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

2.2.1 Definisi Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan sebenarnya sudah lama menjadi perhatian para ahli. Namun istilah keberlanjutan (*sustainability*) sendiri baru muncul beberapa dekade yang lalu, walaupun perhatian terhadap keberlanjutan sudah dimulai sejak Malthus pada tahun 1798 yang mengkhawatirkan ketersediaan lahan di Inggris akibat ledakan penduduk yang pesat. Satu setengah abad kemudian, perhatian terhadap keberlanjutan ini semakin mengental setelah Meadow dan kawan-kawan pada tahun 1972 menerbitkan publikasi yang berjudul *The Limit to Growth* (Meadow et al., 1972) dalam kesimpulannya, bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam. Dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas, arus barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam tidak akan selalu bisa dilakukan secara terus menerus (*on sustainable basis*).

Pembangunan berkelanjutan adalah sebagai upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Dewasa ini masalah pembangunan berkelanjutan telah dijadikan sebagai isu penting yang perlu terus di sosialisasikan di tengah masyarakat agar masyarakat

maupun Negara kita dapat bersaing dan berkembang mengikuti perkembangan jaman secara globalisasi. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah sebuah upaya pembangunan suatu negara yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan bahkan budaya untuk kebutuhan masa kini tetapi tidak mengorbankan atau mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang serta sehingga dapat menciptakan masyarakat yang dapat berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan hidup.

Selain pemaparan diatas konsep pembangunan berkelanjutan telah didefinisikan oleh berbagai ahli dan organisasi internasional. Berikut adalah beberapa definisi dari para ahli terkemuka:

1. Definisi Brundtland (Komisi Brundtland):

Menurut "Our Common Future" yang dikenal sebagai Laporan Brundtland (1987), pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai "pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri." Laporan ini dikeluarkan oleh Komisi Dunia Lingkungan dan Pembangunan yang dipimpin oleh Gro Harlem Brundtland.

2. Definisi United Nations (PBB):

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai "pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri."

3. Definisi Paul Ekins:

Ahli lingkungan Paul Ekins mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai "kombinasi dari pertumbuhan ekonomi yang menjamin pemenuhan kebutuhan

materi dasar sekarang dan di masa depan, serta perbaikan kualitas lingkungan, mempromosikan persamaan sosial dan menghormati budaya."

4. Definisi Herman Daly:

Ekonom Herman Daly mengemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah "pembangunan yang memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kapasitas planet ini untuk memenuhi kebutuhan generasi masa depan."

5. Definisi World Commission on Environment and Development (WCED):

Komisi Dunia Lingkungan dan Pembangunan (WCED) lebih lanjut menggambarkan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya "untuk memperbaiki kualitas kehidupan manusia sambil membatasi penurunan kualitas lingkungan bumi."

Pendapat ahli bisa bervariasi dalam penekanan aspek-aspek tertentu dari pembangunan berkelanjutan, tetapi intinya adalah menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memastikan bahwa kebutuhan generasi saat ini terpenuhi tanpa merugikan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Aspek yang mempengaruhi pembangunan berkelanjutan

1) Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang dan dapat meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang ini tanpa mengurangi kemampuan alam, masyarakat dan ekonomi untuk menaikkan kesejahteraan generasi masa depan. Jadi, jika generasi saat ini bisa maju maka Maksud dari lingkaran adalah keberlanjutan ekonomi, lingkungan dan sosial digambarkan sebagai lingkaran yang saling menutupi

sebagaimana dengan keberlanjutan (*sustainability*) sebagai keadaan di tengah-tengahnya. masyarakat bisa mencapai kesejahteraan. Sehingga kemudian terdapat alur ekonomi yang berjalan terus menerus, tanpa mengurangi tingkat kesejahteraan dari generasi ke generasi.

2) Aspek Sosial

Aspek sosial, maksudnya dipengaruhi oleh manusia sebagai pendukung komunitas dalam hal interaksi, interrelasi dan interdependensi. Hal-hal yang merupakan perhatian utama dalam aspek social adalah stabilitas penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pertahanan keanekaragaman budaya dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Aspek yang terdiri dari sosial sebagai berikut:

1. Memastikan adanya distribusi yang baik dari biaya dan keuntungan dari pembangunan disemua aspek kehidupan.
2. Menghargai dan meningkatkan perhatian terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan masyarakat dan politik, budaya ekonomi dan keamanan. Aspek yang terdiri dari pemerintahan sebagai berikut:
Mendukung wakil rakyat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan mendorong kebebasan usaha dengan memberikan insentif, kebijakan dan sistem yang mendukung meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan akurasi informasi meningkatkan akuntabilitas

3) Aspek Lingkungan

Faktor lingkungan (ekologi) yang diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, aspek ekologi merupakan aspek yang

banyak disorot ketika membahas tentang *sustainable design*. Hal ini disebabkan karena aspek ini terkait langsung dengan faktor-faktor alami yang ada di bumi yang kita pijak ini. Sehingga hal-hal yang menunjukkan degradasi lingkungan jelas terlihat dan terasa. Aspek yang terdiri dari lingkungan sebagai berikut:

1. Meminimalkan sampah dan kerusakan lingkungan
2. Meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap sumberdaya alam dan lingkungan
3. Melindungi modal alam yang kritis/penting.

Pembangunan berkelanjutan menjadi dasar bagi banyak inisiatif, program, dan kebijakan di seluruh dunia, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2015. SDGs terdiri dari 17 tujuan yang mencakup berbagai aspek pembangunan berkelanjutan dan menjadi panduan bagi banyak negara dalam upaya mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

Pemerintah Indonesia memandang pembangunan berkelanjutan mencakup sejumlah inisiatif dan upaya untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan, serta pemberdayaan sosial. Beberapa poin penting dalam kebijakan ini termasuk:

1. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai dengan Perjanjian Paris. Ini mencakup upaya untuk mengurangi deforestasi, meningkatkan penggunaan energi terbarukan, dan melakukan reboisasi.

2. Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Pemerintah Indonesia berusaha untuk membangun infrastruktur dengan mempertimbangkan dampak lingkungan. Ini termasuk pembangunan jalan, pelabuhan, dan bandara yang lebih ramah lingkungan serta pengembangan transportasi umum.

3. Konservasi Lingkungan

Upaya konservasi alam, termasuk pelestarian hutan dan perlindungan sumber daya air, adalah bagian penting dari kebijakan pembangunan berkelanjutan. Ini bertujuan untuk mempertahankan ekosistem yang berharga bagi kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati.

4. Peningkatan Akses ke Energi Terbarukan

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap energi terbarukan, seperti energi matahari dan angin, dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

5. Pengembangan Pertanian Berkelanjutan

Dalam rangka memastikan ketahanan pangan, pemerintah juga berfokus pada pengembangan pertanian berkelanjutan, termasuk praktik-praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

6. Pemberdayaan Sosial

Kebijakan ini juga mencakup upaya pemberdayaan sosial, seperti peningkatan akses pendidikan, perbaikan kesehatan masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang kurang beruntung.

7. Kolaborasi Internasional

Indonesia berpartisipasi dalam kerja sama internasional dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan. Ini mencakup kerja sama dengan negara-negara lain, lembaga-lembaga internasional, dan organisasi non-pemerintah.

8. Penegakan Hukum dan Regulasi

Pemerintah juga berkomitmen untuk menegakkan hukum dan regulasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk peraturan-peraturan lingkungan yang ketat.

2.2.2 Prinsip Pembangunan berkelanjutan

Memang diakui bahwa konsep keberlanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutanpun sangat multidimensi dan multi-interpretasi. Menurut Heal, (Fauzi,2004). Konsep keberlanjutan ini paling tidak mengandung dua dimensi: *Pertama* adalah dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. *Kedua* adalah dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan. Pezzey (1992) melihat aspek keberlanjutan dari sisi yang berbeda. Dia melihat bahwa keberlanjutan memiliki pengertian statik dan dinamik. Keberlanjutan dari sisi statik diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan laju teknologi yang konstan, sementara keberlanjutan dari sisi dinamik diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat teknologi yang terus berubah. Karena adanya multidimensi dan multi-interpretasi ini, maka para ahli sepakat untuk sementara mengadopsi pengertian yang telah disepakati oleh komisi Brundtland yang menyatakan bahwa "Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi

mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ada dua hal yang secara implisit menjadi perhatian dalam konsep brunland tersebut. Pertama, menyangkut pentingnya memperhatikan kendala sumber daya alam dan lingkungan terhadap pola pembangunan dan konsumsi. Kedua, menyangkut perhatian pada kesejahteraan (well-being) generasi mendatang. Heal (1998) menyatakan bahwa asumsi keberlanjutan paling tidak terletak pada tiga aksioma dasar; (1) Perlakuan masa kini dan masa mendatang yang menempatkan nilai positif dalam jangka panjang; (2) Menyadari bahwa aset lingkungan memberikan kontribusi terhadap economic wellbeing; (3) Mengetahui kendala akibat implikasi yang timbul pada aset lingkungan.

Konsep ini dirasakan masih sangat normatif sehingga aspek operasional dari konsep keberlanjutan ini pun banyak mengalami kendala. Perman et.al.,(1997) mencoba mengelaborasi lebih lanjut konsep keberlanjutan ini dengan mengajukan 5 lima alternatif pengertian:

1. Suatu kondisi dikatakan berkelanjutan (sustainable) jika utilitas yang diperoleh masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak menurun sepanjang waktu (non-declining consumption)
2. Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi dimasa mendatang,
3. Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam (natural capital stock) tidak berkurang sepanjang waktu (nondeclining),
4. keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumber daya alam, dan (5) keberlanjutan adalah adanya kondisi keseimbangan dan daya tahan(resilience) ekosistem terpenuhi.

Senada dengan pemahaman diatas, Daly (1990) menambahkan beberapa aspek mengenai definisi operasional pembangunan berkelanjutan, antara lain:

1. Untuk sumber daya alam yang terbarukan : laju pemanenan harus sama dengan aju regenerasi (produksi lestari).
2. Untuk masalah lingkungan: laju pembuangan limbah harus setara dengan kapasitas asimilasi lingkungan.

Sumber energi yang tidak terbarukan harus dieksploitasi secara quasisustainable, yakni mengurangi laju deplesi dengan cara menciptakan energi substitusi. Selain definisi operasional diatas, Haris (2000) melihat bahwa konsep keberlanjutan dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman, (1) keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan industri. (2) Keberlanjutan lingkungan: Sistem keberlanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi. (3). Keberlanjutan sosial, keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

2.2.3 Potensi Pembangunan

Potensi pembangunan daerah sangat bervariasi tergantung pada lokasi geografis, sumber daya yang tersedia, infrastruktur, kondisi demografi, dan faktor-faktor ekonomi serta sosial lainnya. Pertimbangan Penting dalam Potensi Pembangunan Daerah:

1. Lokasi dan Sumber Daya Alam

Daerah yang terletak di pesisir, memiliki potensi besar dalam sektor perikanan dan pariwisata. Pantainya yang indah dan keragaman hayati lautnya adalah daya tarik bagi wisatawan. Selain itu, tanah subur di wilayah ini mendukung pertanian dan kehutanan yang berkelanjutan.

2. Tenaga Kerja

Wilayah ini memiliki populasi yang terdidik dan berpotensi untuk meningkatkan sektor jasa, termasuk pendidikan dan teknologi informasi. Universitas lokal berperan penting dalam pengembangan keterampilan tenaga kerja.

3. Infrastruktur

Ketersediaan pelabuhan dan jaringan transportasi yang baik membuat ekspor produk perikanan lebih mudah. Infrastruktur energi terbarukan yang sedang berkembang juga menjanjikan potensi dalam pengembangan energi terbarukan.

4. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah kabupaten telah meluncurkan inisiatif untuk mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan dan mengurangi dampak lingkungan. Kebijakan ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

5. Kepemimpinan dan Partisipasi Masyarakat

Pemimpin lokal yang visioner bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk mempromosikan inovasi dan pengembangan usaha kecil dan menengah. Ini memperkuat rasa memiliki masyarakat dalam proses pembangunan.

6. Sumber Daya Manusia

Universitas lokal menghasilkan lulusan berkualifikasi yang mendukung pertumbuhan sektor pendidikan, dan pelatihan tenaga kerja yang memungkinkan pengembangan sektor teknologi informasi.

7. Keberlanjutan Lingkungan

Kabupaten ini aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dengan membatasi pembangunan yang merusak alam, mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan, dan mengadopsi energi terbarukan.

8. Kepasaran

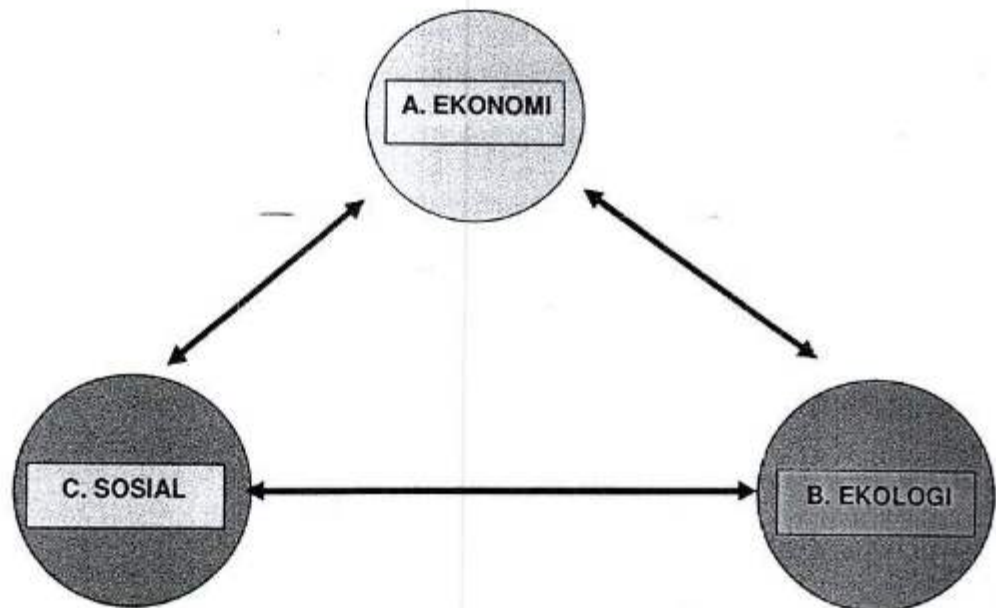
Dengan akses yang baik ke pasar regional dan peluang untuk ekspor produk perikanan dan produk pertanian ke luar negeri, kabupaten ini memiliki potensi ekonomi yang signifikan.

Potensi pembangunan daerah ini adalah contoh dari bagaimana faktor-faktor berbeda dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Namun, setiap daerah memiliki konteksnya sendiri, dan penting untuk melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi potensi unik dan mengembangkan strategi pembangunan yang sesuai. Beberapa contoh potensi pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

a. Bidang pertanian

Pembangunan pertanian berperan strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis tersebut ditunjukkan oleh peran-nya dalam pembentukan kapital, penyediaan yang berkelanjutan, sebagai bagian dari implementasi pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pembangunan pertanian (termasuk pembangunan perdesaan) yang berkelanjutan merupakan isu penting strategis yang menjadi perhatian dan pembicaraan disemua negara dewasa ini. Pembangunan pertanian berkelanjutan selain sudah menjadi tujuan, tetapi juga sudah menjadi paradigma pola pembangunan pertanian. Pendekatan dan praktek pertanian konvensional yang dilaksanakan di sebagian besar negara maju dan negara sedang berkembang termasuk Indonesia merupakan praktek pertanian yang tidak mengikuti prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pertanian konvensional dilandasi oleh pendekatan industrial dengan orientasi pertanian agribisnis skala besar, padat modal, padat inovasi teknologi, penanaman benih/varietas tanaman unggul secara seragam spasial dan temporal, serta ketergantungan pada masukan produksi, termasuk penggunaan berbagai jenis agrokimia (pupuk dan pestisida) dan alat mesin pertanian. Menurut perhitungan ekonomi memang penerapan pertanian konvensional dianggap sebagai alternatif teknologi yang tepat untuk menyelesaikan masalah kekurangan pangan dan gizi serta ketahanan pangan yang dihadapi penduduk dunia. Namun belakangan ini disadari praktek pertanian konvensional tersebut ternyata pada sebagian wilayah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti banyak dilaporkan oleh berbagai lembaga penelitian dan lembaga swadaya masyarakat serta pakar ekonomi dan

lingkungan. Sebagaimana diungkapkan oleh Salim, E. (2011), eksploitasi sumber daya alam oleh kegiatan pembangunan perkebunan dan pertambangan telah melebihi kapasitas daya dukung ekologis (caryying capacity), sehingga terjadi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Berbagai dampak ekologi, ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan masyarakat semakin meragukan masyarakat dunia akan keberlanjutan ekosistem pertanian dalam menopang kehidupan manusia pada masa mendatang.



Bagan 1: ekosistem pertanian

Menurut Kerangka Segitiga Konsep Pembangunan Berkelanjutan diatas, suatu kegiatan pembangunan (termasuk pertanian dan agribisnis) dinyatakan berkelanjutan, jika kegiatan tersebut secara ekonomis, ekologis dan sosial bersifat berkelanjutan (Srageldin, 1996 dalam Dahuri, 1998). Berkelanjutan secara ekonomis berarti suatu kegiatan pembangunan harus dapat

membuahkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan kapital (capital maintenance) dan penggunaan sumber daya serta investasi secara efisien. Berkelanjutan secara ekologis mengandung arti bahwa kegiatan tersebut harus dapat mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan dan konservasi sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati (biodiversity). Sementara itu berkelanjutan secara sosial, mensyaratkan bahwa suatu kegiatan pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil-hasil pembangunan, mobilitas sosial, kohesi sosial dan pengembangan kelembagaan. Walau banyak variasi definisi pembangunan berkelanjutan, termasuk pertanian berkelanjutan, yang diterima secara luas ialah yang bertumpu pada tiga dimensi pilar: ekonomi, sosial, dan ekologi. Dimensi ekonomi berkaitan dengan konsep maksimisasi aliran pendapatan yang dapat diperoleh dengan setidaknya mempertahankan asset produktif yang menjadi basis dalam memperoleh pendapatan tersebut. Indikator utama dimensi ekonomi ini ialah tingkat efisiensi dan daya saing, besaran dan pertumbuhan nilai tambah dan stabilitas ekonomi. Dimensi ekonomi menekankan aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi manusia baik untuk generasi sekarang ataupun mendatang.

Dimensi sosial, adalah orientasi kerakyatan, berkaitan dengan kebutuhan akan kesejahteraan sosial yang dicerminkan oleh kehidupan sosial yang harmonis (termasuk tercegahnya konflik sosial), reservasi keragaman budaya dan modal sosio kebudayaan, termasuk perlindungan terhadap suku minoritas. Untuk itu, pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan berusaha dan pendapatan partisipasi sosial politik dan stabilitas sosial budaya merupakan indikator-indikator penting yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembangunan.

Dimensi lingkungan alam, menekankan kebutuhan akan stabilitas ekosistem alam yang mencakup sistem kehidupan biologis dan materi alam. Termasuk dalam hal ini ialah terpeliharanya keragaman hayati dan daya dukung biologis, sumber daya tanah, air dan agroklimat, serta kesehatan dan kenyamanan lingkungan penekanan dilakukan pada preservasi daya lentur dan dinamika ekosistem untuk beradaptasi terhadap perubahan bukan pada konservasi suatu kondisi ideal statis yang mustahil dapat diwujudkan. Ketiga dimensi tersebut saling mempengaruhi sehingga ketiganya harus dipertimbangkan secara berimbang. Sistem sosial yang stabil dan sehat serta sumber daya alam dan lingkungan merupakan basis untuk kegiatan ekonomi, sementara kesejahteraan ekonomi merupakan prasyarat untuk terpeliharanya stabilitas sosial budaya maupun kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pertanian berkelanjutan mengutamakan pengelolaan ekosistem pertanian yang mempunyai diversitas atau keanekaragaman hayati tinggi. Menurut FAO Agricultural Biodiversity meliputi variasi dan variabilitas tanaman, binatang dan jasad renik yang diperlukan untuk mendukung fungsi-fungsi kunci ekosistem pertanian, struktur dan prosesnya untuk memperkuat dan memberikan sokongan pada produksi, pangan dan keamanan pangan (Ukabc,2007). Ekosistem pembangunan dengan keanekaragaman tinggi, lebih stabil dan tahan guncangan, risiko terjadinya kerugian finansial lebih kecil, dapat mengurangi dampak bencana kekeringan dan banjir, melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit dan kendala alam lainnya. Diversifikasi juga dapat mengurangi cekaman ekonomi akibat peningkatan harga pupuk, pestisida dan input-input produksi lainnya. Oleh karena itu, ketahanan pangan merupakan

salah satu tujuan utama pertanian berkelanjutan, sejalan dengan pertanian berkelanjutan adalah konsep "green agriculture" yang dapat didefinisikan sebagai usaha pertanian maju dengan penerapan teknologi secara terkendali sesuai dengan ketentuan protokol yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh produktivitas secara optimal.

Pembangunan berkelanjutan dalam bidang pertanian adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian, sambil memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sambil melindungi sumber daya alam dan meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan. Berikut adalah beberapa prinsip dan pendekatan dalam pembangunan berkelanjutan bidang pertanian:

1. Pertanian Ramah Lingkungan

Penggunaan metode pertanian yang berkelanjutan, seperti pertanian organik, agroforestri, dan praktik pertanian konservasi, yang mengurangi penggunaan pestisida, pupuk kimia, dan menjaga kesuburan tanah serta kualitas air.

2. Pengelolaan Sumber Daya

Pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah dan air dengan bijak, termasuk pengelolaan air yang efisien, konservasi tanah, dan pengendalian erosi. Ini memastikan keberlanjutan produksi pertanian jangka panjang.

3. Diversifikasi Produksi

Memperluas keragaman produksi pertanian, termasuk berbagai jenis tanaman dan peternakan, untuk mengurangi risiko ketidakpastian cuaca dan perubahan iklim serta untuk meningkatkan ketahanan pangan.

4. Peningkatan Produktivitas

Meningkatkan produktivitas tanaman dan hewan melalui penggunaan varietas unggul, teknologi pertanian, dan praktik manajemen yang lebih baik.

5. Peningkatan Keamanan Pangan

Memastikan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi melalui peningkatan produksi lokal, distribusi, dan penyediaan akses ekonomi.

6. Pemberdayaan Petani

Meningkatkan kapasitas dan keterampilan petani dengan pelatihan dan pendidikan, serta memberikan akses ke teknologi dan sumber daya yang diperlukan.

7. Kesejahteraan Sosial

Meningkatkan kesejahteraan petani dan komunitas pedesaan dengan memastikan adanya kondisi kerja yang layak, perlindungan sosial, dan distribusi yang adil dari manfaat pertanian.

8. Perubahan Iklim

Mengintegrasikan strategi penyesuaian dan mitigasi perubahan iklim dalam sektor pertanian, termasuk praktik-praktik yang mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim.

9. Pasar dan Pemasaran

Meningkatkan akses petani ke pasar yang berarti dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan harga yang adil atas produk-produk pertanian mereka.

10. Partisipasi dan Pengambilan Keputusan

Mendorong partisipasi aktif petani dan komunitas pedesaan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan pertanian berkelanjutan.

Dengan demikian perikanan yang berkelanjutan tidak hanya ditujukan pada kelestarian sumber daya ikan saja atau keuntungan ekonomi saja, akan tetapi lebih dari itu, yaitu termasuk untuk keberlanjutan komunitas perikanan yang ditunjang oleh keberlanjutan institusi yang tercakup didalamnya kualitas keberlanjutan perangkat regulasi, kebijakan dan organisasi untuk mendukung tercapainya ekologi, ekonomi dan komunitas perikanan. Langkah/upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia dalam rangka pemanfaatan sumber daya ikan secara optimum dan pengelolaan yang bertanggung jawab (*responsible fisheries*).

Pengaturan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab (*responsible fisheries*) tidak saja mendapatkan pengaturan secara nasional tetapi juga pengaturan secara internasional. Pemanfaatan sumber daya ikan yang terdapat di ZEE sesuai dengan amanah UNCLOS III, maka dalam rangka konservasi sumber daya ikan, Indonesia menetapkan bahwa diizinkan negara lain dapat berpartisipasi di ZEE Indonesia jika JTB untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya. Sehingga pemanfaatan yang melibatkan negara lain tetap dalam koridor pengelolaan yang didasarkan pada ketersediaan objeknya (sumber daya ikan). Pada prinsipnya pengaturan sumber daya ikan secara nasional berlandaskan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil
- 2) Meningkatkan penerimaan dan devisa negara
- 3) Mendorong perluasan dan kesempatan kerja
- 4) Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan,
- 5) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan

- 6) Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing,
- 7) Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan
- 8) Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal dan menjamin kelestarian sumber daya ikan.

Selanjutnya dalam penjabaran ketentuan Pasal 6 ayat (1) tersebut di atas oleh pemerintah Indonesia telah diatur dan ditetapkan potensi sumber daya ikan dan JTB menurut kelompok jenis ikan dan wilayah pengelolaan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP). Dalam rangka pengelolaan perikanan yang menjamin kelestarian sumber daya ikan di lingkungan seluruh Indonesia, wilayah pengelolaan perikanan kemudian diubah dari 9 WPP menjadi 11 WPP.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka Menteri menindaklanjuti dengan menetapkan ketentuan pengelolaan perikanan. Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan tersebut, Menteri menetapkan:

1. Rencana pengelolaan perikanan;
2. Potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
3. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
4. Potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
 - 1) Jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan;

- 2) Jenis, jumlah, ukuran dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
- 3) Daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan;
- 4) Persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
- 5) Pelabuhan perikanan;
- 6) Sistem pemantauan kapal perikanan;
- 7) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- 8) Rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- 9) Ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
- 10) kawasan konservasi perairan;
- 11) Jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia;
- 12) Jenis ikan yang dilindungi.

c. Bidang Peternakan

Kebutuhan akan bahan pangan hewani terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk Indonesia. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Untuk menciptakan peternakan yang mampu memenuhi kebutuhan pangan hewani namun tanpa menciptakan bencana di masa depan. Bukan lagi hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia secara umum. Bahwa peternakan menjadi salah satu sektor penyumbang gas rumah kaca. Dengan adanya hal tersebut maka harus tercipta peternakan yang ramah lingkungan. Gas rumah kaca tersebut dapat timbul karena kotoran dari hewan. Untuk meminimalisir gas rumah kaca

yang tercipta di bidang peternakan. Hendaknya sebuah peternakan menggunakan bahan pakan alami atau organik untuk temaknya temak (Bahri dan Tiesnamurti, 2012).

Isu pembangunan peternakan berkelanjutan di Indonesia erat kaitannya dengan standar kompetensi lulusan program studi sarjana peternakan. Pembangunan peternakan berkelanjutan pada prinsipnya memiliki 5 (lima) dimensi, yaitu dimensi ekologi, dimensi ekonomi, dimensi sosial dan budaya, dimensi kelembagaan, dan dimensi teknolog. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa standar nasional pendidikan tinggi ialah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Standar kompetensi lulusan telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. Standar kompetensi lulusan tersebut erat kaitannya dengan peranan mahasiswa sebagai agent of change dalam pembangunan peternakan berkelanjutan. Perez et al. (2020) menyebutkan bahwa salah satu keunggulan anak muda yang berperan dalam bidang peternakan/pertanian ialah mampu mengadopsi manajemen agro-ekologi dengan baik. Po dan Hickey (2020) juga menambahkan bahwa dukungan kemajuan pembangunan daerah dapat memperkuat penggunaan modal sosial untuk proses pemberdayaan petani rakyat.

Pembangunan berkelanjutan di bidang peternakan merupakan suatu upaya untuk memastikan bahwa kegiatan peternakan dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berikut adalah beberapa potensi pembangunan berkelanjutan di bidang peternakan:

- 1) Peningkatan Produktivitas
Menggunakan teknologi modern dan praktik pengelolaan yang lebih baik untuk meningkatkan produktivitas ternak, seperti pakan yang lebih baik, manajemen kesehatan yang lebih baik, dan pemuliaan yang lebih efisien.
- 2) Penggunaan Sumber Daya yang Berkelanjutan
Mengelola sumber daya alam seperti air, lahan, dan energi dengan bijak untuk mencegah kerusakan lingkungan yang berlebihan.
- 3) Kesejahteraan Hewan
Meningkatkan standar kesejahteraan hewan dalam peternakan untuk memastikan bahwa hewan-hewan yang diternakkan diperlakukan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan alamiah mereka.
- 4) Diversifikasi
Mendorong diversifikasi dalam peternakan, misalnya, dengan mengkombinasikan peternakan tanaman dengan peternakan hewan untuk menciptakan sistem pertanian yang lebih berkelanjutan.
- 5) Mengurangi Limbah
Mengelola limbah peternakan dengan baik untuk mengurangi dampak lingkungan. Salah satu contoh adalah pengelolaan kotoran ternak yang efisien.
- 6) Penggunaan Teknologi Hijau
Mengadopsi teknologi hijau seperti panel surya untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil.
- 7) Pemberdayaan Petani
Meningkatkan akses petani ke sumber daya, pendidikan, dan pasar untuk meningkatkan hasil dan kesejahteraan mereka.

8) Pengembangan Varietas Tahan Iklim

Membangun atau mengembangkan varietas hewan yang tahan terhadap perubahan iklim dan penyakit.

9) Penggunaan Sumber Daya Lokal

Mendorong penggunaan sumber daya lokal, termasuk pakan lokal, untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan mengurangi jejak karbon.

10) Kemitraan dan Kolaborasi

Membangun kemitraan antara pemerintah, produsen, lembaga riset, dan organisasi lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam peternakan.

11) Pengembangan Pasar

Membantu petani memasarkan produk mereka secara efisien, baik di tingkat lokal maupun internasional, untuk meningkatkan pendapatan dan menjamin keberlanjutan usaha peternakan.

12) Pendidikan dan Kesadaran

Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya praktik berkelanjutan di kalangan petani, konsumen, dan masyarakat umum.

Penting untuk diingat bahwa pembangunan berkelanjutan dalam peternakan memerlukan komitmen jangka panjang dan upaya yang berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, kita dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di bidang peternakan yang lebih ramah lingkungan, sosial, dan ekonomis.

d. Bidang Perkebunan

Pembangunan berkelanjutan di bidang perkebunan merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini melibatkan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan sosial secara bijak sehingga perkebunan dapat berkontribusi secara positif terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Berikut adalah beberapa potensi pembangunan berkelanjutan di bidang perkebunan:

- 1) **Diversifikasi Tanaman:** Menanam berbagai jenis tanaman dapat membantu mengurangi risiko kerugian akibat serangan hama, penyakit, atau perubahan cuaca. Selain itu, diversifikasi juga dapat meningkatkan produktivitas dan mendukung ketahanan pangan.
- 2) **Penggunaan Teknologi Pertanian Berkelanjutan:** Penerapan teknologi pertanian yang berkelanjutan, seperti penggunaan pupuk organik, irigasi yang efisien, dan metode tanam yang ramah lingkungan, dapat membantu meningkatkan produktivitas tanaman tanpa merusak lingkungan.
- 3) **Praktik Pengelolaan Lahan yang Berkelanjutan:** Menggunakan praktik-praktik pengelolaan lahan yang berkelanjutan, seperti pemeliharaan tanah, konservasi air, dan pengendalian erosi, dapat membantu menjaga kualitas tanah dan air untuk jangka panjang.
- 4) **Perkebunan Berkelanjutan:** Menjaga keberlanjutan perkebunan dengan mengurangi penggunaan pestisida berbahaya, mendukung polinasi alami, dan mempromosikan keseimbangan ekosistem dapat menjaga keanekaragaman hayati dan lingkungan sekitar.

- 5) Pemberdayaan Petani: Melalui pelatihan, akses ke informasi, dan dukungan finansial, petani dapat diberdayakan untuk meningkatkan praktik-praktik berkelanjutan dan meningkatkan produktivitas mereka.
- 6) Perdagangan Berkelanjutan: Membangun rantai pasokan yang berkelanjutan dengan menghormati hak-hak pekerja dan mendukung praktik bisnis yang etis dapat membantu mempromosikan pembangunan berkelanjutan di sektor perkebunan.
- 7) Investasi dalam Energi Terbarukan: Menggunakan energi terbarukan dalam operasi perkebunan, seperti panel surya atau tenaga angin, dapat membantu mengurangi jejak karbon perkebunan dan berkontribusi pada perubahan iklim yang lebih baik.
- 8) Penerapan Praktik Sosial yang Berkelanjutan: Menghormati hak-hak masyarakat lokal, memberikan manfaat kepada komunitas sekitar, dan mempromosikan ketahanan sosial adalah aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan di bidang perkebunan.

Pembangunan berkelanjutan di bidang perkebunan membutuhkan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, petani, dan masyarakat lokal. Upaya bersama ini dapat membantu menciptakan perkebunan yang tidak hanya produktif tetapi juga berkelanjutan dari segi lingkungan dan sosial.

e. Bidang Pariwisata

Pembangunan pariwisata saat ini diarahkan kepada pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Hal tersebut karena kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan terarah pada penggunaan sumberdaya alam dan penggunaan sumberdaya manusia untuk jangka waktu panjang Sharpley (2000) dalam Budiani, Sri Rahayu.

Wahdaningrum, (2018). Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam ras, suku, bahasa dan budaya sehingga banyak negara-negara tetangga yang ingin belajar dan mengenal lebih dekat bagaimana pariwisata Indonesia. Beragam pariwisata yang ditawarkan mulai dari keindahan alam dan budaya dari tiap-tiap daerah dari sabang sampai merauke seperti Bali dan Lombok, Papua yang telah dikenal dunia karena pesona alamnya dan budaya warga setempat. Pariwisata di Indonesia semakin eksis dan berkembang.

Menurut Siaran Pers Rakomas Kepariwisata ke-IV, 2016 dalam catatan Aisyianita, (2017) Pariwisata diyakini sebagai sektor yang mampu menjadi stimulan penggerak perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hampir seluruh daerah di Indonesia mulai fokus dan berbenah untuk meningkatkan kualitas pariwisata daerah masing - masing. Hal ini sejalan dengan program pembangunan pariwisata nasional yang memiliki target mampu menjaring 20 juta wisatawan mancanegara, 275 juta wisatawan nusantara, dan 13 juta lapangan pekerjaan pada tahun 2019. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam membuat kebijakan pengembangan pariwisata sehingga baik masyarakat maupun wisatawan dapat mematuhi segala kebijakan dan peraturan yang telah ditentukan. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kelestarian wisata alam dan budaya di Indonesia.

Pengembangan pariwisata suatu daerah akan memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak tersebut akan berpengaruh yang signifikan, baik bagi negara tujuan maupun bagi masyarakat lokal Goodwin, (1996) dalam Pumamasari, (2011). Hal tersebut disebabkan oleh perilaku pengusaha yang sebagian besar memonopoli usaha pariwisata baik dalam skala kecil maupun skala besar. Sehingga peran sektor swasta dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan ini juga dapat

membantu pemerintah dalam mewujudkan pariwisata yang dapat dikenal berbagai daerah dan negara.

Dalam mewujudkan pengembangan destinasi wisata yang baik diperlukan peningkatan mutu dan kualitas atas destinasi tersebut guna menciptakan citra destinasi yang baik pula dimata pengunjung maupun masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah, pihak pengelola, serta masyarakat perlu memahami tentang komponen destinasi wisata yakni *Attraction* (atraksi), *Accessibility* (aksesibilitas), *Amenity* (aminitas), dan *Ancillary* (fasilitas tambahan) sebagaimana disebut sebagai 4A. Sehingga apabila keempat elemen telah terpenuhi maka destinasi kepuasan wisatawan terhadap destinasi wisata meningkat dan citra pariwisata juga terbangun (Bagus & Wanda, 2018).

Pariwisata akan menjadi industry terbesar dengan pertumbuhan yang pesat dalam perekonomian jasa dan akan menjadi penggerak utama ekonomi suatu negara bersama dengan industry telekomunikasi dan teknologi informasi. *World Tourism Organization* (1998) juga memperkirakan bahwa mobilitas wisatawan dunia akan mencapai angka 900 juta wisatawan pada tahun 2004, dimana kawasan Asia Pasifik (termasuk Indonesia didalamnya) akan menjadi kawasan tujuan wisata utama yang mengalami pertumbuhan paling tinggi diantara kawasan-kawasan lainnya di dunia.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang saat ini diminati banyak orang di berbagai negara untuk berinvestasi salah satunya Negara Indonesia. Oleh karena itu berbagai Negara berlomba-lomba dalam memperbaiki dan mengembangkan pariwisata yang ada di negaranya. Dengan menggunakan pengembangan pariwisata berkelanjutan maka dampak yang ditimbulkan dapat berkelanjutan. Maksudnya adalah dengan adanya kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia maka Negara

ndoneisa memiliki modal untuk membranding citra negara dan juga memperkenalkan pariwisata-pariwisata yang ada. Upaya pembangunan pariwisata tersebut perlu kerjasama yang baik antara pihak yang terkait (pemerintah, masyarakat, dan sektor privat) sehingga destinasi wisata dapat dikembangkan dengan optimal. Tiga pilar tersebut merupakan syarat untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Hadinoto (1996) dalam Widodo, (2016) pariwisata dianggap sebagai hal yang memiliki sifat multi dimensi dengan rangkaian dalam proses pembangunan. Pembangunan pariwisata berkaitan dengan masalah sosial, budaya, ekonomi dan politik. Sedangkan Suwena (2010:86) pembangunan destinasi pariwisata atau daya tarik wisata merupakan tempat dimana segala kegiatan pariwisata bisa dilakukan dengan tersedianya segala fasilitas dan atraksi wisata untuk wisatawan. Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama dalam kegiatan sosial dan ekonomi, dalam menghadapi tantangan dan peluang telah dilakukan perubahan peran pemerintah dibidang kebudayaan dan pariwisata yang pada masa lalu berperan sebagai pelaksana pembangunan, saat ini lebih difokuskan hanya kepada tugas-tugas pemerintahan terutama sebagai fasilitator agar kegiatan pariwisata yang dilakukan dapat berkembang dengan pesat. (Sukimo, 2006 dalam Kumala, Muktiyah. Soelistyo, Aris. Nuraini, 2017). Dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah tempat yang bersifat multi-dimensi yang didalamnya berkaitan dengan masalah sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Selain itu, pariwisata juga dapat meningkatkan pembangunan suatu daerah.

Hidayat, (2011) berpendapat bahwa Sustainable Tourism (pariwisata berkelanjutan) dan sustainable development (pembangunan berkelanjutan) adalah istilah yang mengakibatkan bermacam-macam tanggapan/respons dari manajermanajer, perencana-perencana pariwisata serta pembela/advokat lingkungan,

baik skeptis sampai yang memperhatikan. Pariwisata berkelanjutan didefinisikan oleh UNWTO sebagai pariwisata yang memperhitungkan secara penuh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan sekarang dan yang akan datang, menjawab kebutuhan pengunjung, industri (pariwisata), lingkungan dan komunitas tuan rumah (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2012). Berdasarkan teori diatas bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan yaitu pengembangan pariwisata yang dalam upaya perencanaannya memperhatikan segala kemungkinan yang terjadi, seperti dampak yang akan ditimbulkan, hambatan yang akan muncul, serta cara mengatasi dan mencegah kemungkinan tersebut. Menurut Noor & Pratiwi, (2016) konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan, yaitu:

- 1) Melakukan usaha-usaha yang dapat menjamin kelestarian sosial-budaya dan lingkungan hidup yang ada serta melindungi dari hal-hal yang dapat mengancam keberadaannya;
- 2) Memberikan pendidikan dan pelatihan tentang kepariwisataan kepada masyarakat lokal dan mengikutsertakan mereka dalam proses perencanaan, pengembangan, pelestarian, serta penilaian terhadap pengembangan pariwisata;
- 3) Menggunakan konsep daya tampung (*carrying capacity*), yaitu membatasi kunjungan wisatawan sesuai dengan kapasitas yang dapat ditampung oleh atraksi wisata tersebut sehingga tidak menimbulkan dampak yang negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal;
- 4) Memberikan informasi dan pendidikan kepada wisatawan dan juga masyarakat lokal mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya;

- 5) Melakukan penelitian secara berkala untuk mengetahui perkembangan dan penyimpangan yang terjadi sehubungan dengan penerapan dari konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Ada 5 prinsip dasar dari setiap elemen pembangunan berkelanjutan yaitu partisipasi, integrasi, pemerataan, keanekaragaman, dan perspektif jangka panjang (Rahadian, 2016). Dalam pembangunan keberlanjutan perlu memperhatikan elemen-elemen pembangunan pariwisata berkelanjutan agar terciptanya pariwisata berkualitas. Selain itu juga dibutuhkan strategi-strategi dalam pengembangannya. Menurut Suryono (2004, hal 80) dalam Sefira Ryalita Primadany, Mardiyono, (2013) strategi pada prinsipnya berkaitan dengan persoalan: Kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana-prasarana. Dalam penerapannya terdapat strategi yang mana harus berkaitan dengan tujuan sarana dan cara sehingga dalam pengembangan pariwisata daerah, pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata. Dan tentunya juga implementasi dari strategi tersebut harus sesuai dengan visi misi pembangun pariwisata suatu daerah.

Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan konsep yang ideal dalam negara-negara berkembang. Konsep ini digunakan untuk menghadapi tantangan kedepan dalam era globalisasi dengan memperhatikan aspek sosial, buda, ekonomi, politik. Pembangunan pariwisata berkelanjutan harus didukung dengan kebijakan pengembangan pariwisata yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Djafar (2015) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata merupakan upaya pengembangan yang terencana dengan sistematis dan menyeluruh, sehingga manfaat

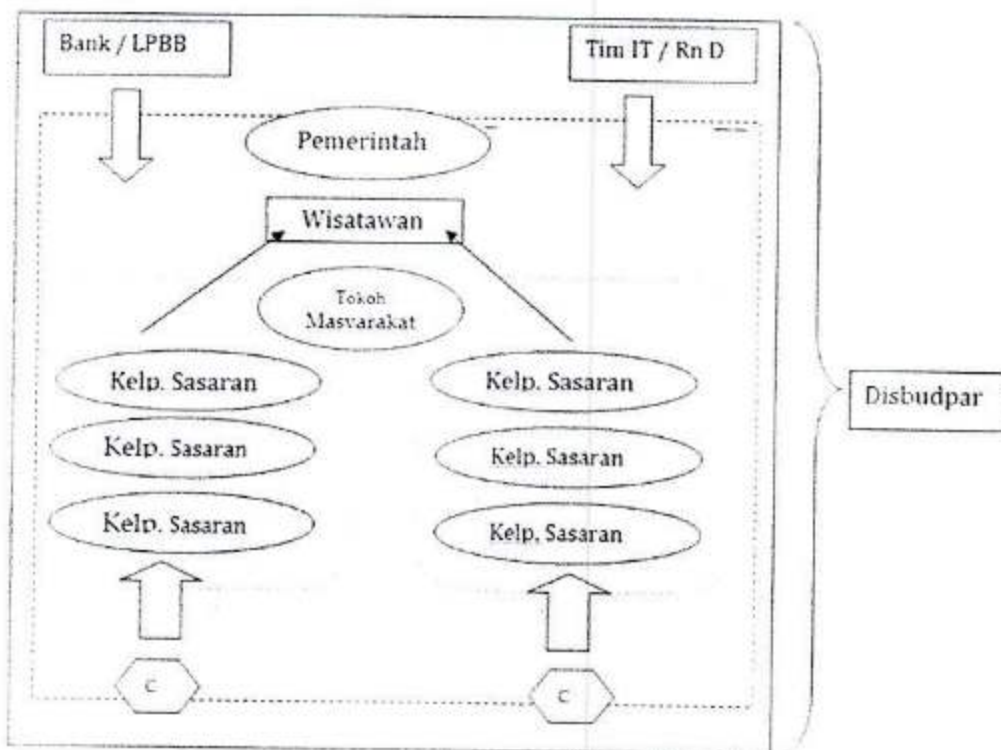
yang ditimbulkan bisa lebih optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan kultural.

Dalam Jumal (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2012) yang berpedoman dari UNWTO mengemukakan bahwa dalam Pembangunan Berkelanjutan terdapat pedoman atau ketentuan yang hendaknya:

- 1) Memanfaatkan sumberdaya lingkungan yang menjadi elemen kunci dalam pembangunan kepariwisataan secara optimal, menjaga proses ekologi penting dan membantu mengkonservasikan pusaka alam dan keanekaragaman hayati;
- 2) Menghormati keotentikan sosio-budaya dan komunitas tuan rumah, melestarikan pusaka buatan dan kehidupan budaya masa kini, nilai-nilai tradisional, dan berkontribusi terhadap pemahaman antar budaya dan toleransi;
- 3) Memastikan berlangsungnya operasi jangka panjang, yang memberikan manfaat sosio-ekonomi kepada semua pemangku kepentingan yang terdistribusi secara berkeadilan, termasuk lapangan kerja yang stabil dan peluang komunitas tuan rumah untuk beroleh pendapatan dan pelayanan sosial, serta berkontribusi terhadap penghapusan kemiskinan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan memerlukan partisipasi dari semua pemangku kepentingan yang mendapat informasi, dan juga kepemimpinan politik yang kuat untuk menjamin adanya partisipasi yang luas dan terbangunnya konsensus. Mencapai pariwisata berkelanjutan merupakan proses yang berkesinambungan dan hal itu memerlukan pemantauan dampak secara konstan, mengenalkan tindakan pencegahan dan/atau tindakan korektif bila diperlukan. Pariwisata berkelanjutan juga harus menjaga tingkat kepuasan wisatawan yang tinggi dan menjamin pengalaman yang penuh makna bagi wisatawan, menumbuhkan

kesadaran tentang isu-isu keberlanjutan dan mempromosikan praktek-praktek pariwisata berkelanjutan di antara mereka.

Jumal (Rani Maha, 2014) mengkaji tentang pariwisata yang menggunakan pola pendekatan kluster. Amalia & Purwaningsih, (2016) mengatakan bahwa telah didapatkan pola untuk mengembangkan kearifan wisata lokal menjadi paket wisata digunakan sistem kluster. Berikut adalah contoh model yang telah dibuat Sulaeman (2006) dengan beberapa modifikasi disesuaikan dalam pengembangan kluster kearifan wisata lokal.



Bagan 2: model analisis pariwisata sulaeman

f. Bidang Pertambangan

Pertambangan merupakan salah satu aktivitas yang memanfaatkan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam ini dapat dilakukan dengan pencairan, penggalian atau bahkan peledakan guna memperoleh hasil tambang yang diharapkan. Kegiatan pertambangan banyak dilakukan pada kawasan hutan yang memiliki potensi, bahkan sejumlah kawasan pertambangan telah mengubah fungsi hutan menjadi kawasan kematian meskipun terdapat upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup namun tidak seimbang. Dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan, kegiatan penambangan yang terjadi di kawasan hutan dapat merusak ekosistem hutan, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam bentuk pencemaran air, tanah, dan udara yang disebabkan oleh benda-benda asing sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi seperti semula.

Persoalan lingkungan hidup pada pertambangan dalam kenyataannya di Indonesia, banyak dipersoalkan. Penyebabnya, adalah timbulnya dampak negatif dalam pengusahaan bahan galian sebagai akibat dari usaha pertambangan berupa, rusaknya hutan, tercemarnya laut, terjangkitnya penyakit, serta terjadinya konflik masyarakat pada lingkaran tambang. Potensi pembangunan berkelanjutan di bidang pertambangan merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk memaksimalkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari sektor pertambangan, sambil meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya. Pertambangan merupakan industri penting yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian banyak negara, tetapi seringkali dianggap sebagai sumber masalah lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, pendekatan berkelanjutan di sektor pertambangan sangat penting. Berikut adalah beberapa potensi pembangunan berkelanjutan di bidang pertambangan:

- a. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan: Penggunaan teknologi terbaru dalam pertambangan, seperti penggunaan mesin yang lebih efisien dan pengelolaan limbah yang baik, dapat membantu mengurangi dampak lingkungan, termasuk peningkatan emisi gas rumah kaca dan polusi air.
- b. Pengelolaan Air yang Bertanggung Jawab: Air adalah aspek penting dalam pertambangan, baik untuk proses produksi maupun untuk lingkungan sekitar. Pengelolaan air yang berkelanjutan melibatkan praktik konservasi air, pemulihan air limbah, dan pemantauan kualitas air.
- c. Penyelarasan dengan Keberlanjutan Sosial: Pertambangan seringkali melibatkan pengelolaan wilayah yang dihuni oleh masyarakat lokal. Pertambangan yang berkelanjutan harus menghormati hak-hak masyarakat lokal, mempromosikan partisipasi masyarakat dalam proses keputusan, dan memberikan manfaat kepada komunitas tersebut.
- d. Kesehatan dan Keselamatan Kerja: Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan aspek penting dalam pertambangan. Upaya untuk mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit terkait pekerjaan, serta memastikan kesejahteraan para pekerja, adalah langkah penting dalam pembangunan berkelanjutan di sektor ini.
- e. Pemulihan dan Reklamasi Lahan: Setelah tambang selesai dieksploitasi, pemulihan dan reklamasi lahan adalah kunci untuk mengembalikan lahan tersebut ke keadaan yang layak untuk digunakan kembali atau mengembalikannya ke lingkungan semula. Praktik pemulihan yang efektif dapat membantu meminimalkan dampak jangka panjang.

- f. Inovasi dan Riset: Pengembangan inovasi dalam penggunaan sumber daya mineral, proses pertambangan yang lebih efisien, dan metode pemantauan dampak lingkungan adalah hal-hal yang dapat mendorong pembangunan berkelanjutan di sektor pertambangan.
- g. Keterlibatan Pihak-pihak Berkepentingan: Pihak-pihak berkepentingan, termasuk pemerintah, industri, masyarakat lokal, dan LSM, perlu terlibat dalam dialog terbuka untuk mengidentifikasi masalah dan solusi yang dapat mendukung pertambangan berkelanjutan.
- h. Peningkatan Transparansi dan Tata Kelola: Meningkatkan transparansi dalam operasi pertambangan dan tata kelola yang baik adalah langkah penting untuk meminimalkan risiko korupsi dan memberikan manfaat yang lebih adil kepada masyarakat.
- i. Diversifikasi Ekonomi: Komunitas yang sangat tergantung pada pertambangan perlu mencari cara untuk diversifikasi ekonomi mereka agar tidak hanya bergantung pada sektor pertambangan. Ini dapat menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih besar.
- j. Sertifikasi dan Standar Berkelanjutan: Menerapkan standar sertifikasi yang berkelanjutan dalam industri pertambangan dapat membantu memastikan bahwa praktik-praktik yang lebih baik diadopsi dan dipatuhi.

Pembangunan berkelanjutan di sektor pertambangan adalah suatu tantangan, tetapi juga merupakan peluang untuk mengubah industri ini menjadi kekuatan positif yang berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini memerlukan komitmen bersama dari semua pihak terlibat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam industri pertambangan.

2.2.4 Modal Pembangunan berkelanjutan

Dalam teori pertumbuhan ekonomi dikenal faktor-faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau suatu negara antara lain jumlah penduduk dan tenaga kerja, modal atau kapital, sumberdaya alam dan lingkungan, teknologi dan faktor sosial. Fokus kita dalam tulisan ini adalah peran sumberdaya alam dan lingkungan dalam pertumbuhan atau pembangunan ekonomi. Kalau diamati secara teliti sumberdaya alam dan lingkungan bukan merupakan faktor utama yang menentukan kemajuan suatu negara. Kemajuan suatu negara biasa diukur dengan melihat tinggi rendahnya pendapatan per kapita penduduk di Negara bersangkutan; dan terbukti banyak negara yang tidak memiliki sumberdaya alam yang cukup, tetapi justru merupakan negara yang maju dengan pendapatan perkapita yang tinggi, seperti Singapore, Jepang, Taiwan, Korea; sedangkan banyak negara yang sumberdaya alamnya berlimpah masih merupakan negara yang terbelakang dengan pendapatan perkapita yang relatif rendah seperti Indonesia, India, Philipina, Vietnam, dan negara-negara Amerika Latin. Bahkan sudah ada artikel yang ditulis mengenai kutukan sumberdaya alam (natural resource curse) atau dikenal juga dengan "*the paradox of plenty*" yang ditemukan di negara-negara yang sedang berkembang yang kaya dengan sumberdaya alam. Kondisi paradoks (paradoxical situation) menunjuk pada negara-negara yang kaya akan sumberdaya alam khususnya yang non-renewable justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang stagnant dan bahkan mengalami kemunduran. (Jeffrey A. Frankel, 2010)

Ada dua definisi tentang pembangunan berkelanjutan; yaitu pembangunan berkelanjutan dalam arti kuat (strong definition) dan berkelanjutan dalam arti lunak (weak definition). Berkelanjutan dalam arti kuat atau keras menghendaki agar nilai semua modal pembangunan; yaitu nilai modal manusia (human capital) ditambah nilai ekosistem sebagai modal alami (natural capital) ditambah lagi dengan modal buatan manusia (human made capital) tetap atau tidak mengalami penurunan. Sedangkan dalam arti lunak pembangunan berkelanjutan memungkinkan adanya substitusi di antara ketiga jenis modal pembangunan; utamanya nilai modal alami kalau berkurang dapat diimbangi dengan peningkatan nilai modal manusia dan modal buatan manusia. Sebagai contoh seandainya terjadi penurunan jumlah modal alami seperti minyak bumi dan batu bara yang selalu dieksploitasi atau diambil dari bumi kita, maka dikehendaki agar nilai modal manusia dan/atau nilai modal buatan manusia meningkat yang dibiayai dengan memanfaatkan modal alami yang diambil dari alam di daerah yang bersangkutan. Para ekonom lebih dapat menerima definisi pembangunan berkelanjutan dalam arti lunak atau lemah.

Disamping itu untuk keberhasilan pembangunan berkelanjutan, disyaratkan pula perlunya modal sosial yang mampu memelihara hubungan kerja sama yang baik antar berbagai lembaga pemerintahan baik secara vertikal maupun horisontal, serta diperlukan pula sinergi antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dengan pendekatan multi pihak dari ketiga kelompok tersebut dalam penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan (Baca Ismid Hadad, 2010). Jadi intinya jangan sampai sumberdaya alam habis dan lingkungan rusak tanpa peningkatan baik jumlah dan kualitas sumberdaya manusia maupun modal buatan manusia.

2.2.5 Strategi Pembangunan Berkelanjutan

Dari berbagai konsep yang ada maka dapat dirumuskan prinsip dasar dari setiap elemen pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini ada komponen yang perlu diperhatikan yaitu pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang.

1. Pembangunan yang Menjamin Pemerataan dan Keadilan Sosial.

Pembangunan yang berorientasi pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi hal-hal seperti; meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya peran dan kesempatan perempuan, meratanya ekonomi yang dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan. Namun pemerataan bukanlah hal yang secara langsung dapat dicapai. Pemerataan adalah konsep yang relatif dan tidak secara langsung dapat diukur. Dimensi etika pembangunan berkelanjutan adalah hal yang menyeluruh, kesenjangan pendapatan negara kaya dan miskin semakin melebar, walaupun pemerataan dibanyak negara sudah meningkat. Aspek etika lainnya yang perlu menjadi perhatian pembangunan berkelanjutan adalah prospek generasi masa datang yang tidak dapat dikompromikan dengan aktivitas generasi masa kini. Ini berarti pembangunan generasi masa kini perlu mempertimbangkan generasi masa datang dalam memenuhi kebutuhannya.

2. Pembangunan yang menghargai keanekaragaman

Pemeliharaan keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa datang. Keanekaragaman hayati juga merupakan dasar bagi keseimbangan ekosistem. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan

yang merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti.

3. Integrasi

Pembangunan yang Menggunakan Pendekatan Integratif. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat atau merusak. Hanya dengan memanfaatkan pengertian tentang kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial. Dengan menggunakan pengertian ini maka pelaksanaan pembangunan yang lebih integratif merupakan konsep pelaksanaan pembangunan yang dapat dimungkinkan. Hal ini merupakan tantangan utama dalam kelembagaan.

4. Pembangunan yang Meminta Perspektif Jangka Panjang

Masyarakat cenderung menilai masa kini lebih dari masa depan. Implikasi pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang melandasi penilaian ini. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dilaksanakan penilaian yang berbeda dengan asumsi normal dalam prosedur discounting. Persepsi jangka panjang adalah perspektif pembangunan yang berkelanjutan. Hingga saat ini kerangka jangka pendek mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi, oleh karena itu perlu dipertimbangkan.

Strategi pembangunan berkelanjutan adalah serangkaian pendekatan, kebijakan, dan tindakan yang dirancang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berikut adalah beberapa strategi penting yang dapat digunakan dalam pembangunan berkelanjutan:

a. Integrasi Aspek Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi

Strategi berkelanjutan harus mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari semua kebijakan dan tindakan. Ini melibatkan pemahaman bahwa ketiga aspek ini saling terkait dan harus dikelola bersama.

b. Pengurangan Jejak Karbon

Strategi berkelanjutan harus fokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan penggunaan energi berbasis fosil. Ini dapat mencakup penggunaan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan promosi transportasi berkelanjutan.

c. Pengurangan Penggunaan Sumber Daya Alam

Penting untuk mengelola sumber daya alam secara bijak dan efisien. Ini mencakup praktik-praktik pertanian berkelanjutan, penggunaan air yang bijak, dan pemanfaatan sumber daya mineral yang berkelanjutan.

d. Pemberdayaan Masyarakat

Mempromosikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memberikan akses yang lebih baik ke sumber daya dan layanan adalah strategi kunci. Hal ini membantu dalam menciptakan keadilan sosial dan ekonomi.

e. Edukasi dan Kesadaran

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu berkelanjutan dan pentingnya tindakan berkelanjutan adalah strategi yang sangat penting. Edukasi dapat membantu dalam mengubah perilaku dan memotivasi tindakan berkelanjutan.

- f. **Pengembangan Teknologi Berkelanjutan**
Inovasi teknologi berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan. Mendorong penelitian dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan adalah strategi yang sangat penting.
- g. **Kebijakan dan Regulasi**
Pemerintah perlu mengadopsi kebijakan dan regulasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti pajak karbon, subsidi energi terbarukan, dan pembatasan polusi.
- h. **Investasi Berkelanjutan**
- i. **Mendorong investasi swasta dan publik dalam proyek-proyek berkelanjutan,** seperti energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan teknologi hijau, adalah strategi penting untuk mempercepat perubahan.
- j. **Kerja Sama Internasional**
Isu-isu berkelanjutan seringkali melintasi batas negara. Kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian iklim, perdagangan berkelanjutan, dan bantuan luar negeri berkelanjutan sangat penting.
- k. **Pemantauan dan Evaluasi**
Penting untuk memantau kemajuan dan hasil dari strategi berkelanjutan. Ini melibatkan pengembangan indikator kinerja yang relevan dan pemantauan yang berkelanjutan.
- l. **Rencana Jangka Panjang**
Pembangunan berkelanjutan memerlukan perencanaan jangka panjang yang mencakup visi jangka panjang, tujuan yang terukur, dan langkah-langkah strategis.

m. **Resolusi Konflik**

Konflik dan ketegangan dapat menghambat pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi juga harus mencakup pemecahan konflik dan perdamaian.

Strategi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks masing-masing negara, wilayah, atau sektor. Penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, bisnis, masyarakat sipil, dan individu, dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pembangunan berkelanjutan agar mencapai hasil yang maksimal.

2.3. Konsep Dana Desa

2.3.1 Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Dana desa merupakan salah satu isu krusial dalam Undang-Undang Desa, perhitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa. Anggaran Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Pembangunan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut, namun mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintahan diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana desa tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Anggaran Pendapatan dan Belanja bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana Alokasi Desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten meliputi:

- a. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD).
- b. Anggaran Dana Desa.

- c. Penyisihan pajak dan retribusi daerah
- d. Sumbangan bantuan lainnya dari Kabupaten.

Pembagian Anggaran Dana Desa (ADD) dapat dilihat berdasarkan Variabel Independen Utama dan Variabel Independen Tambahan dengan rincian sebagai berikut: 1. Asas Merata adalah bagian Anggaran Dana Desa (ADD) yang sama untuk setiap desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal. Alokasi Dana Desa (ADD) Variabel Independen Utama sebesar 70% dan Variabel Independen Tambahan sebesar 30%. 2. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap desa. Berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), Variabel Proporsional Utama sebesar 60% dan Variabel Proporsional Tambahan sebesar 40%. Variabel Independen Utama adalah variabel yang dinilai terpenting untuk menemukan nilai bobot desa. Variabel utama ditunjukkan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di desa. Variabel Independen Utama meliputi sebagai berikut:

- a. Indikator Kemiskinan.
- b. Indikator Pendidikan Dasar.
- c. Indikator Kesehatan.
- d. Indikator Keterjangkauan Desa.

Variabel Independen Tambahan merupakan variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah yang meliputi sebagai berikut:

- a. Indikator Jumlah Penduduk
- b. Indikator Luas Wilayah

- c. Indikator Potensi Ekonomi (PBB)
- d. Indikator Jumlah Unit Komunitas (Dusun)

2.3.2 Otonomi Desa

Otonomi desa adalah konsep yang memberikan tingkat otonomi atau kemandirian yang lebih besar kepada desa dalam mengelola urusan lokal mereka. Konsep ini memberi desa hak dan kewenangan untuk mengambil keputusan terkait dengan pembangunan, pemerintahan, dan pengelolaan sumber daya di tingkat desa. Otonomi desa bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berikut adalah beberapa poin penting terkait konsep otonomi desa:

1. Pemisahan Kekuasaan

Otonomi desa melibatkan pemisahan kekuasaan antara tingkat desa, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat nasional. Desa memiliki kewenangan yang terbatas dalam hal pengambilan keputusan, sementara hal-hal yang lebih besar atau strategis ditangani oleh tingkat pemerintah yang lebih tinggi.

2. Pengelolaan Sumber Daya Lokal

Otonomi desa memberikan desa kewenangan untuk mengelola sumber daya alam, ekonomi, dan sosial mereka sendiri. Ini termasuk pengelolaan tanah, air, hutan, serta pengembangan ekonomi lokal.

3. Partisipasi Masyarakat

Otonomi desa mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ini mencakup peran masyarakat dalam perencanaan pembangunan, pemantauan proyek, dan evaluasi hasil pembangunan.

4. Pembentukan Peraturan Lokal

Desa memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan lokal (perdes) yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka sendiri. Ini memungkinkan desa untuk mengatasi masalah lokal dengan cara yang lebih fleksibel.

5. Pengelolaan Keuangan Desa

Otonomi desa mencakup pengelolaan keuangan desa, termasuk anggaran dan alokasi dana. Desa memiliki hak untuk mengelola dan mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas lokal mereka.

6. Pemilihan Kepala Desa

Dalam konteks otonomi desa, kepala desa sering dipilih melalui pemilihan umum oleh penduduk desa. Ini adalah upaya untuk memastikan akuntabilitas kepemimpinan desa terhadap masyarakat.

7. Bentuk Pemerintahan Desa

Otonomi desa dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk pemerintahan desa, termasuk desa hukum adat, desa adat, desa konvensional, atau bentuk pemerintahan lokal lainnya, tergantung pada konteks budaya dan hukum setempat.

8. Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Otonomi desa dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal dengan memberikan desa kewenangan dalam mengatur bisnis dan investasi lokal.

10. Keberlanjutan Lingkungan

Desa dapat memainkan peran penting dalam pelestarian lingkungan alam melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pengurangan dampak lingkungan negatif.

11. Pengembangan Sosial dan Kesejahteraan

Otonomi desa juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan memungkinkan desa mengatur layanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan mereka.

Otonomi desa adalah upaya untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat yang paling terpengaruh olehnya. Konsep ini berfokus pada pemahaman bahwa setiap desa memiliki karakteristik, kebutuhan, dan potensi yang unik, dan oleh karena itu, mereka harus memiliki kontrol lebih besar atas masa depan mereka. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi dasar hukum utama untuk implementasi otonomi desa.

2.3.3. Kebijakan Dana Desa

Pemendagri No 113 Tahun 2013 tentang wewenang Pemerintah Desa untuk mengelola keuangan secara mandiri, antara lain:

1. Pendapatan asli Desa,
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
3. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab/Kota,
5. hasil retribusi daerah,
6. hibah dari pihak ketiga maupun pendapatan Desa lainnya Untuk pembangunan infrastruktur, kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan Desa dan masyarakat Desa yang disusun sebagai rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari rencana keuangantahunan Desa

2.2.4 Tujuan dan sasaran Dana Desa

Desa memiliki hak dan kewajiban. Salah satu haknya adalah mengelola segala aset yang dimiliki oleh Desa termasuk aset yang berupa uang atau barang yang diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat, sedangkan salah satu kewajiban Desa adalah melakukan keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban desa. Tujuan dan Sasaran Dana Desa, yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan publik di Desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian Desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa
5. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

2.2.5 Pengelolaan Dana Desa

Kegiatan pengelolaan APBD yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran. Tujuan pengelolaan anggaran meliputi:

1. Kesejahteraan masyarakat; dengan pengelolaan anggaran yang baik maka akan mendorong kearah perbaikan ekonomi, distribusi pendapatan yang tepat sasaran sehingga akan menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan mengarah kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat.
2. Membuka kesempatan kerja; anggaran dikelola dengan baik dan alokasi anggaran yang tepat terhadap objek-objek vital akan menarik lapangan kerja sehingga ada distribusi anggaran kepada para pekerja sehingga daya beli masyarakat menjadi tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Mengurangi pengangguran; efektivitas dan efisiensi anggaran dan perubahan alokasi anggaran kepada optimalisasi angkatan kerja dengan berbagai bentuk perluasan lahan pekerjaan yang baru.
4. Pelayanan masyarakat; indikator keberhasilan sebuah pemerintahan adalah bagaimana masyarakat merasa terlayani dengan baik dengan memperoleh tingkat kepuasan yang optimal. Masyarakat merasakan kepuasan maka masyarakat semakin sejahtera.

Dari keempat tujuan pengelolaan anggaran tersebut dapat dilihat adanya kesinambungan dan keselarasan antara tujuan penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dengan pengelolaan anggaran sehingga dapat diilustrasikan bahwa penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan baik jika ditopang dengan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan ekonomis. Dalam pengelolaan Belanja Daerah ada 6 prinsip, yaitu:

1. Kriteria dalam pemilihan program yang akan dilaksanakan dengan yang akan dibiayai dengan pendapatan daerah diupayakan tidak mengandung unsur kegagalan dengan adanya unsur penjaminan. Jaminan keamanan yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan.
2. Jumlah pengeluaran secara total dari semua unit kerja harus mendukung kebijakan makro ekonomi.
3. Arah pengeluaran anggaran antara unit dalam berbagai jenis pengeluaran adalah peningkatan kesejahteraan.
4. Implikasi dari program-program kunci pada kelompok miskin harus dianalisis dengan baik.

5. Alokasi dana untuk belanja rutin dan belanja pembangunan dalam setiap program harus dianalisis dengan terintegrasi.
6. Lembaga yang terlibat di dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran perlu dianalisis. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 dan 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam sebuah sistem pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terdapat 3 (tiga) pilar tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu:

1. **Transparansi**; keterbukaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana proporsi pengeluaran pemerintah yang mengarah kepada perbaikan kehidupan masyarakat.
2. **Akuntabilitas**; pertanggungjawaban yang baik dan tepat, kesesuaian penggunaan anggaran dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. **Partisipatif**; sumbangan pemikiran, dukungan yang diberikan secara maksimal dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Konawe tahun 2023. Sedangkan waktu pelaksanaan kegiatan penelitian ini dilaksanakan selama 4 (empat) bulan terhitung sejak diterimanya usulan judul penelitian ini. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3.1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Bulan/ Minggu)											
	I				II				III			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Kegiatan Administrasi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2. Persiapan Penelitian		■	■									
3. Penyusunan Laporan Pendahuluan				■								
4. Seminar Pendahuluan					■							
5. Pengumpulan Data Penelitian					■	■						
6. Analisis dan Pengolahan Data							■					
7. Penyusunan Draf Laporan Akhir Penelitian								■	■	■		
8. Seminar Akhir Hasil Penelitian											■	
9. Finalisasi Laporan Akhir												■
10. Penyerahan Laporan Akhir												■

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dalam mengumpulkan data. Metode kualitatif digunakan dalam mengumpulkan data berkaitan dengan gambaran potensi pembangunan di Kabupaten Konawe, penjelasan tentang faktor apa yang

mempengaruhi pengembangan pembangunan di Kabupaten Konawe serta gambaran komunikasi pembangunan dalam pemanfaatan dana desa di Kabupaten Konawe yang digunakan untuk menghasilkan sebuah model bagi pemerintah Kabupaten Konawe dalam pemanfaatan dana desa untuk mencapai pembangunan yang ideal. Dalam penelitian kualitatif yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian. (Tanjung, 2007). Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikitpun belum diketahui.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, teknik pengumpulan data ini menggunakan pedoman wawancara untuk menggali informasi dari informan. Dalam wawancara, akan dieksplor informasi dan data terkait hal-hal yang berkaitan dan dianggap memiliki keterkaitan penting dengan permasalahan penelitian.
2. Observasi langsung. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang terkait dengan topik penelitian.
3. Studi pustaka, teknik pengumpulan data dengan menelaah dokumen-dokumen maupun hasil penelitian yang terkait dengan topik penelitian.

3.4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan dan analisis data dilakukan secara kuantitatif. Data yang diperoleh dalam wawancara, observasi langsung, dan studi pustaka yang terkait dengan kajian model komunikasi pembangunan dalam pemanfaatan dana desa di Kabupaten Konawe melalui pendekatan berkelanjutan dan partisipasi masyarakat dianalisis dengan

teknik analisis kualitatif berupa interpretasi sehingga makna yang terkandung dari setiap informasi dapat dipahami dan dipergunakan untuk memperkuat analisis dan penarikan kesimpulan.

3.5. Jenis Data Penelitian

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yang berbentuk kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif berupa angka-angka, skala-skala, tabel-tabel, formula, dan sebagainya yang menggunakan perhitungan matematis. Sementara data kualitatif adalah data berupa analisis interpretatif dan analisis verbal yang dituangkan dalam bentuk deskripsi secara luas untuk menjelaskan permasalahan penelitian.

3.6. Teknik Penarikan Informan Penelitian

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan melalui metode *purposive sampling* (penentuan sampel secara sengaja) yang diambil dari unsur pemerintah Kabupaten Konawe dan masyarakat Kabupaten Konawe khususnya pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Konawe berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

3.7. Organisasi dan Personil

Untuk kebutuhan analisis, akurasi, dan kualitas hasil penelitian, maka penelitian melibatkan empat orang tenaga ahli menurut bidangnya masing-masing, yang terdiri dari:

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. Ahli Bidang komunikasi pertanian | 1 orang |
| 2. Ahli Komunikasi Pembangunan | 1 orang |
| 3. Ahli Bidang Kebijakan Publik | 1 orang |
| 4. Ahli Bidang Pemerintahan | 1 orang |
| 5. Ahli Bidang Kesejahteraan Sosial | 1 orang |

Tenaga lapangan (enumerator) yang terampil dan terdidik dalam penelitian ini dibutuhkan sebanyak 6 orang guna kebutuhan pengambilan data (survey, wawancara, dan observasi) di lokasi penelitian.

1. **Ketua Tim Peneliti.** Ketua tim peneliti mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;

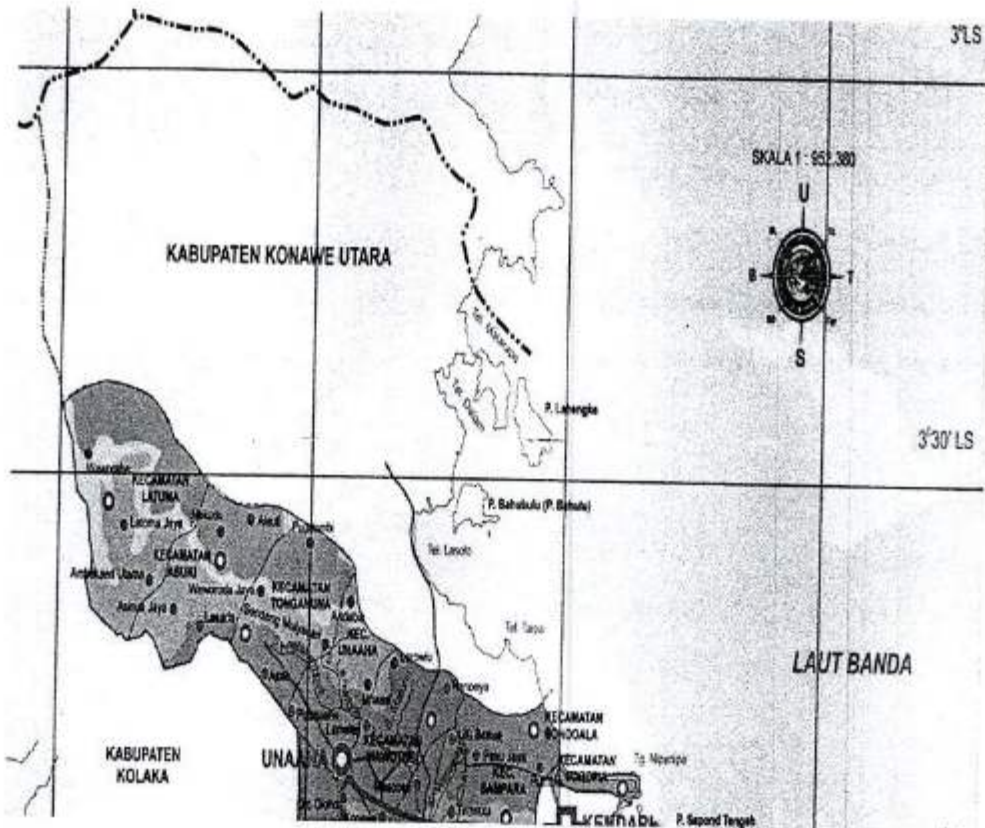
- a) Memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan selesai
- b) Merumuskan strategi dasar konsep model pengembangan kawasan wisata bahari melalui pendekatan berkelanjutan dan partisipasi masyarakat
- c) Bertanggung jawab atas semua layanan jasa konsultasi sesuai dengan kerangka acuan kerja
- d) Merumuskan permasalahan mengenai skala prioritas yang dihadapi selama penyusunan kajian

2. **Anggota Tim.** Anggota tim peneliti mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut ;

- a) Membantu ketua tim dalam menyusun rancangan penelitian dan metode survey
- b) Membantu ketua tim dalam melakukan interpretasi data
- c) Menentukan dimensi-dimensi pengukuran penelitian
- d) Menentukan konsep sampling penelitian.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Konawe



Gambar 1. Peta Kabupaten Konawe

Kabupaten Konawe terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kabupaten ini terletak di bagian tenggara Pulau Sulawesi. Berikut adalah gambaran umum tentang Kabupaten Konawe:

1. Geografi:

Luas Wilayah Kabupaten Konawe sekitar 5.512,49 kilometer persegi. Kabupaten Konawe termasuk dalam wilayah pesisir. Kabupaten Konawe memiliki garis pantai yang panjang, sehingga sebagian besar masyarakatnya beraktivitas di sekitar wilayah pesisir.

Seperti Kecamatan Soropia. Sementara sebagian wilayahnya, terdapat pegunungan yang merupakan bagian dari pegunungan di Sulawesi Tenggara serta dataran rendah. Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki beberapa potensi yang perlu dikembangkan, terutama di sektor perikanan, perkebunan, pertanian, pertambangan dan perdagangan. Dari ke empat sektor tersebut, dapat dikembangkan menjadi sektor unggulan daerah sehingga mampu mendorong ekonomi lokal

2. Pemerintahan

Kabupaten Konawe terbagi menjadi beberapa kecamatan, dengan ibu kota kabupaten berada di Unaaha. Kabupaten Konawe terbagi menjadi 27 kecamatan, 57 kelurahan dan 297 desa. Adapun 29 wilayah Kecamatan tersebut yakni;

- 1) Kecamatan Soropia,
- 2) Kecamatan Lalonggasumeeto,
- 3) Kecamatan Sampara,
- 4) Kecamatan Bondoala,
- 5) Kecamatan Besulutu,
- 6) Kecamatan Kapoiala,
- 7) Kecamatan Anggalomoare,
- 8) Kecamatan Morosi,
- 9) Kecamatan Lambuya,
- 10) Kecamatan Uepai,
- 11) Kecamatan Puriala,
- 12) Kecamatan Onembute,
- 13) Kecamatan Pondidaha,
- 14) Kecamatan Wonggeduku,
- 15) Kecamatan Amonggedo,
- 16) Kecamatan Wonggeduku Barat,

- 17) Kecamatan Wawotobi,
- 18) Kecamatan Meluhu,
- 19) Kecamatan Konawe,
- 20) Kecamatan Anggoota,
- 21) Kecamatan Unaaha,
- 22) Kecamatan Anggaberri,
- 23) Kecamatan Abuki,
- 24) Kecamatan Latoma,
- 25) Kecamatan Tongauna,
- 26) Kecamatan Asinua,
- 27) Kecamatan Padangguni,
- 28) Kecamatan Tongauna Utara,
- 29) Kecamatan Rوتا.

Wilayah Kecamatan di Kabupaten Konawe yang memiliki luas wilayah paling besar adalah wilayah Kecamatan Rوتا dengan luas wilayah sebesar 2469,81 km² atau 38,85 % dari total luas wilayah Kabupaten Konawe.

3. Penduduk

Jumlah penduduk Konawe cukup besar dan terus bertambah seiring dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Data penduduk dapat berubah dari waktu ke waktu, hingga saat ini jumlah penduduk Kabupaten Konawe yaitu 266.299 jiwa yang tersebar di beberapa Kecamatan.

4. Ekonomi:

- a. Pertanian termasuk tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan, merupakan sektor ekonomi utama di Kabupaten Konawe. Luas lahan pertanian beragam berdasarkan jenis tanaman, seperti tanaman kelapa sawit pada tahun 2022

mencapai luas 2.062 ha, tanaman kelapa pada 2022 seluas 2.089 ha, tanaman sagu pada 2022 mencapai 1.562 ha, tanaman kakao pada tahun 2022 seluas 12.911 ha, dan tanaman lada pada tahun 2022 seluas 4.523 ha.

- b. Pertambangan menjadi potensi sebagian wilayah di Kabupaten Konawe terlihat dari potensi sumber daya alam, termasuk tambang nikel, yang memiliki dampak besar terhadap ekonomi daerah ini. Perusahaan-perusahaan besar turut memberikan andil dalam pengelolaan pertambangan di Kabupaten Konawe.
- c. Perikanan dan kelautan Seiring dengan garis pantai yang panjang, perikanan juga menjadi sumber ekonomi penting bagi masyarakat Konawe seperti di Kecamatan Soropia. Kecamatan Soropia berada di garis pantai yang panjang sehingga masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai nelayan. Selain itu sebagian masyarakat Kabupaten Konawe berprofesi sebagai budidaya air tawar dengan media empang.

5. Pariwisata:

Konawe memiliki potensi pariwisata dengan pantai-pantai yang indah, pulau-pulau kecil, dan budaya yang kaya. Beberapa tempat yang bisa dikunjungi di Kabupaten Konawe antara lain Pantai Mawasangka, Moramo, gunung teletabis dan lain sebagainya. Pariwisata Kabupaten Konawe sudah cukup di kenal sehingga banyak wisatawan yang masuk ke Kabupaten Konawe.

4.2 Potensi Pembangunan di Kabupaten Konawe

Berikut potensi-potensi pembangunan di Kabupaten Konawe yang dapat di optimalkan dengan memanfaatkan dana desa.

4.2.1 Pertanian

Kabupaten Konawe, sebagai wilayah yang luas dan subur di Provinsi Sulawesi Tenggara, memiliki potensi pertanian yang signifikan. Beberapa potensi pertanian di Kabupaten Konawe meliputi:

1. Pertanian Padi

Pertanian padi merupakan salah satu sektor pertanian utama di Konawe. Banyak petani di daerah ini menghasilkan beras dan produk padi lainnya. Salah satunya adalah kecamatan wawotobi Kelurahan Kulahi. Kelurahan Kulahi merupakan salah satu bagian dari wilayah Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe. Jarak Kelurahan Kulahi dari ibukota kecamatan \pm 2 Km dan jarak dari ibukota kabupaten \pm 8 Km. Luas wilayah daratan Kelurahan Kulahi sekitar 8.868 Ha atau 17,48 persen dari luas wilayah daratan Kecamatan Wawotobi. Permukaan tanah pada umumnya bergunung dan berbukit yang diapit dataran rendah yang sangat potensial untuk pengembangan sector pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan (BPS Konawe, 2019) Iklim Kelurahan Kulahi pada dasarnya sama dengan iklim di daerahdaerah lain di Indonesia, yakni iklim tropis tipe C3 dengan dua musim yaitu 6 bulan basah dan 6 bulan kering. Kelurahan Kulahi mempunyai potensi yang dapat dikembangkan yaitu 5 sub sektor yaitu perkebunan, hortikultura, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Tingkat kemasaman tanah (pH) antara 4 – 6. Mata pencaharian penduduk Kelurahan Kulahi Kecamatan Wawotobi sebagian besar adalah sebagai petani. Sedangkan selebihnya berprofesi sebagai pengusaha dan Pegawai

Negeri. Petani di Kelurahan Kulahi mengusahakan berbagai jenis tanaman hortikultura diantaranya padi sawah dan jagung.



Gambar 2. Potret panen padi di Kabupaten Konawe

2. Kakao

Kakao adalah salah satu komoditas utama di Konawe. Kabupaten ini terkenal sebagai penghasil kakao berkualitas tinggi. Salah satu komoditas unggulan perkebunan yang banyak dikembangkan masyarakat pada usahatani lahan kering adalah pembudidayaan tanaman kakao (*Theobroma cacao* L), dan wilayah Kabupaten Konawe merupakan sentra pengembangan komoditas unggulan kakao rakyat dengan tingkat produktivitas dan mutu hasil usahatani kakao yang dicapai petani rata-rata 0,63 ton/ha. Hal ini lebih rendah dibandingkan produktivitas dan mutu hasil kakao secara nasional dengan rata-rata mencapai 1,2 ton/ha. kecamatan sentra produksi kakao di

Kabupaten Konawe yakni: (1) Desa Panggulawu Kecamatan Uepay, (2) Desa Lawonua Kecamatan Besulutu, dan (3) Desa Sambeani Kecamatan Abuki. Karakteristik wilayah Kabupaten Konawe yang memiliki topografi landai, berbukit sampai bergunung menjadi sangat potensial untuk pengembangan sektor pertanian pada umumnya dan khususnya sub sektor perkebunan. Kondisi iklim umumnya hampir sama dengan wilayah lain di Sulawesi yang mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau, dengan suhu udara berkisar 20oC hingga 33oC. Musim hujan banyak terjadi pada bulan Desember hingga bulan Maret disebabkan kondisi pergerakan arah angin yang berasal dari angin Barat yang bertiup dari Benua Asia dan yang bertiup dari Samudra Pasifik mengandung banyak uap air, sedangkan musim kemarau terjadi mulai bulan April sampai bulan Nopember disebabkan angin Timur yang bertiup dari Benua Australia kurang mengandung uap air. Potensi Pertanian lahan kering Kabupaten Konawe memiliki areal baku (existing area) seluas 282.761 hektar, dengan areal perkebunan kakao rakyat yang telah diusahakan masyarakat seluas 59.554 hektar (21,06 % dari existing area yang ada) dengan luas areal tanaman kakao menghasilkan (TKM) seluas 25.557,20 hektar dan areal tanaman belum menghasilkan (TBM) seluas 33.996,80 hektar. Produktivitas perkebunan kakao rakyat masih di bawah standar rata-rata produktivitas kakao nasional 1,2 ton/ha (Ditjenbun, 2004:51), terlihat dari hasil perkebunan rakyat yang dicapai di daerah penelitian meliputi; produksi kakao 5.769,4 ton, kelapa 2.995,1 ton, lada 1.179,5 ton, kopi 400,4 ton, dan jambu mete 585,1 ton (BPS Kabupaten Konawe, 2008:73-



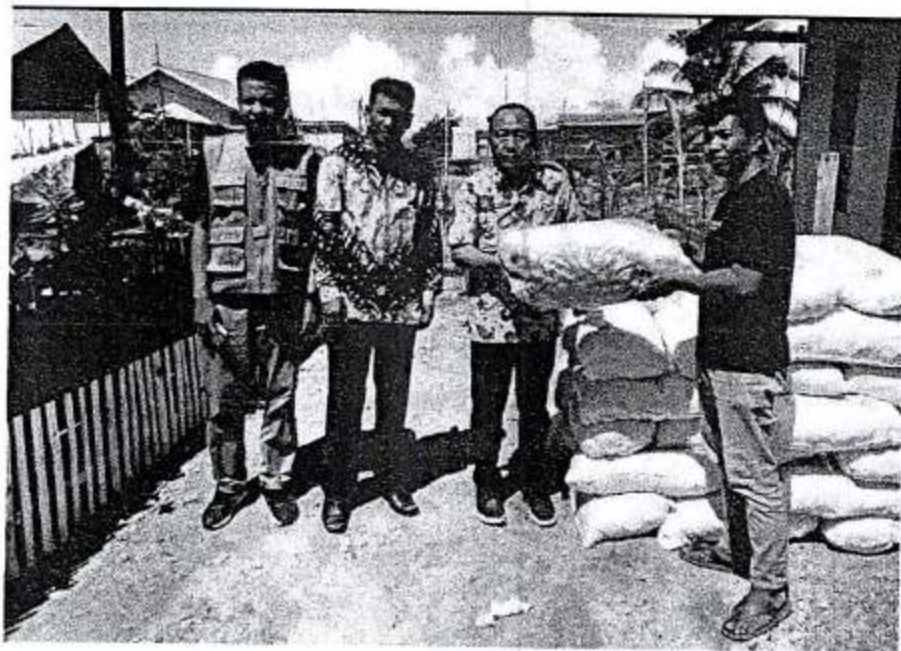
Gambar 3. Kebun Kakao di Kabupaten Konawe

4.2.2 Perikanan

Sebagai daerah pesisir, perikanan memiliki potensi besar di Konawe. Sumberdaya perikanan yang terkandung di daerah ini telah lama dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat lokal sebagai mata pencaharian utamanya, dalam bentuk berbagai usaha perikanan seperti penangkapan ikan dan budidaya. Banyak masyarakat yang bergantung pada hasil laut, seperti ikan, udang, dan kerang. Budidaya ikan air tawar juga dilakukan di beberapa daerah di kabupaten Konawe dengan media budidaya berupa kolam terbuka, tambak terpal, atau sistem lain yang sesuai dengan spesies yang akan dibudidayakan salah satu contohnya di Kabupaten Konawe adalah di Desa Duriasi Kecamatan Wonggeduku.

Selain itu beberapa daerah Kabupaten Konawe yang berada di pesisir pantai tentu memiliki masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Jumlah nelayan di Kabupaten Konawe cukup banyak dan sebagian besar berasal dari Kecamatan Soropia.

Penghasilan nelayan secara langsung akan sangat mempengaruhi kualitas hidup mereka. karena penghasilan dari hasil melaut merupakan sumber pemasukan utama atau bahkan satu-satunya bagi mereka sehingga besar kecilnya penghasilan akan sangat memberikan pengaruh terhadap kehidupan mereka, terutama terhadap kemampuan mereka dalam mengelola lingkungan tempat hidup mereka hal ini berlaku di beberapa daerah pesisir konawe. Maka dari itu sebagai bentuk dukungan Kabupaten Konawe memberikan dukungan dengan bantuan alat tangkap bagi masyarakat khususnya di Kecamatan Soropia.



Gambar 4. Pemberian bantuan alat tangkap di Kecamatan Soropia

4.2.3 Peternakan

Peternakan memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung ekonomi desa. Ini memiliki banyak manfaat, termasuk peningkatan pendapatan bagi penduduk daerah, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi terhadap keamanan pangan. Penjualan hasil ternak seperti daging, dan telur dapat memberikan pendapatan yang

stabil. Di Kabupaten Konawe hampir setiap daerah memiliki masyarakat yang berprofesi sebagai peternak. Salah satu daerah yang cukup di kenal adalah Kecamatan Amonggedo.

Usaha pertanian yang banyak di geluti masyarakat Kabupaten Konawe adalah ternak sapi. Pengembangan usaha peternakan sapi di dukung oleh dinas peternakan, salah satu bentuk dukungannya yaitu dalam pengembangan teknologi untuk perbaikan mutu genetik sapi dengan memberi pelayanan IB serta pelatihan dan fasilitas yang dibutuhkan. Yakni teknologi reproduksi merupakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk perbaikan mutu genetik dan peningkatan efisiensi reproduksi ternak yang unggul. Selain itu sebagai bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Konawe juga mendukung peternakan itik dengan memberikan bantuan berupa bebek itik kepada masyarakat.



Gambar 5. Pemberian Bebek itik kepada masyarakat

4.2.4 Perkebunan

- a. Kelapa sawit juga merupakan komoditas perkebunan yang cukup penting di daerah Kabupaten Konawe. Komoditi unggulan dari sektor perkebunan

adalah kelapa sawit yang nantinya dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara khususnya di kabupaten Konawe. Pendapatan devisa dari non migas dapat dihasilkan melalui hasil olahan dari kelapa sawit menjadi minyak, biasa dikenal dengan nama minyak kelapa sawit (CPO-crude palm oil) yang dijadikan sebagai bahan dasar biodiesel. Kebutuhan akan CPO dipasaran semakin tinggi, menyebabkan beberapa daerah khususnya Kabupaten Konawe membuka beberapa lokasi untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit. Salah satu daerah di Kabupaten Konawe yang menghasilkan kelapa sawit dengan jumlah banyak adalah Kecamatan Anggeri. Wilayah desa yang menjadi pengembangan perkebunan kelapa sawit PT. Tani Prima Makmur berjumlah 3 desa yakni Kelurahan Andabia, Lerehoma, Wundugohi dimana total luasan perkebunan kelapa sawit PT. Tani Prima Makmur di tiga desa Kecamatan Anggeri Seluas 2500 Ha, dimana dengan luasan ini memberikan dampak terhadap kondisi daya dukung lingkungan di Kecamatan Anggeri. Kondisi kualitas prasarana jaringan jalan yang terdapat di Desa Lerehoma, Desa Wundugohi, dan Kelurahan Andabia menjadi jalan utama pengelolaan kelapa sawit di Kabupaten Konawe. Perkebunan kelapa sawit di kecamatan Anggeri seluas 2500 ha, dimana sebaran lokasi perkebunan kelapa sawit tersebar di Kelurahan Andabia, Desa Lerehoma dan Desa Wundugohi, berdasarkan daya tampung lingkungan hidup Kecamatan Anggeri masih belum melebihi ambang batas lingkungan hidup, kemampuan daya dukung lingkungan sangat tergantung dari kemampuan ekosistem dalam menghasilkan jasa penyedia, pemelihara dan jasa perlindungan.



Gambar 6. Perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Konawe

- b. Karet juga menjadi salah satu hasil perkebunan di Kabupaten Konawe. Produksi karet juga ada di beberapa daerah/desa di Konawe salah satunya di Kecamatan Sampara. Potensi perkebunan karet Kabupaten Konawe tergantung pada permintaan pasar. Produk karet digunakan dalam berbagai industri, termasuk industri otomotif, konstruksi, dan manufaktur, sehingga permintaan yang kuat dapat meningkatkan potensi perkebunan.
- c. Beberapa buah-buahan tropis, seperti pisang, durian, langsung, dan rambutan juga tumbuh di Kabupaten Konawe. Buah buahan termasuk kedalan jenis sektor unggulan Kabupaten Konawe. Beberapa daerah di Kabupaten Konawe terkenal dengan buahnya seperti Kecamatan Wonggeduku dan Kecamatan Besulutu.

Pemerintah daerah Kabupaten Konawe dan pihak terkait terus berupaya untuk mengembangkan sektor pertanian dengan memberikan dukungan teknis, pelatihan, dan infrastruktur yang dibutuhkan bagi petani. Potensi pertanian yang beragam ini membuat

Konawe memiliki peran penting dalam penyediaan produk pertanian bagi Provinsi Sulawesi Tenggara dan negara secara keseluruhan.

4.2.5 Pariwisata

Kabupaten Konawe kaya akan tempat wisata yang dikenal banyak orang. Sehingga potensi pariwisata juga patut di kembangkan dalam ekonomi pembangunan. Berikut beberapa potensi pariwisata di Kabupaten Konawe:

a. Pantai

Kabupaten Konawe berkembang menjadi salah satu wilayah yang memiliki karakteristik wisata bahari dan wisata pantai. Sehingga memiliki potensi wisata pesisir yang cukup besar. Salah satu contohnya Obyek wisata Pantai Toronipa merupakan obyek wisata pantai dengan pemandangan laut yang merupakan perpaduan keindahan. Pantai Toronipa terletak di Kelurahan Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe. Obyek wisata Pantai Toronipa sangat strategis dan mudah dijangkau. Sebagai salah satu sumberdaya wisata di Kabupaten Konawe, obyek wisata Pantai Toronipa mulai mengalami perkembangan dari tahun ke tahun yang berupa penambahan berbagai fasilitas yang ada. Peningkatan jumlah pengunjung membuat masyarakat di sekitar kawasan pantai memperoleh kesempatan untuk meningkatkan pendapatan melalui kegiatan usaha yang dilakukan di kawasan seperti kios dan kantin yang menyediakan makanan dan minuman, dan usaha penginapan. Kemudian juga menyewakan fasilitas wisata seperti pondok/gazebo, sarana renang seperti ban, ruang bilas, banana boat dengan harga yang relatif terjangkau. Kondisi ini menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dalam bentuk usaha kecil dengan memanfaatkan pengembangan

wisata pantai yang dilakukan pemerintah. Pengembangan wisata pantai tidak terlepas dari kehidupan masyarakat sekitarnya, dalam hal ini adalah aktivitas masyarakat pesisir. Pasir putih Pantai Toronipa membentang sepanjang 4 km mengikuti bibir pantai. Ketika air laut pantai Toronipa surut, pengunjung dapat menyaksikan jajaran terumbu karang dengan mata telanjang. Beragamnya terumbu karang pada pantai ini begitu indah karena kelestariannya masih terjaga dengan sempurna baik oleh pengelola maupun warga sekitar. Pengunjung bisa membawa terumbu karang unik dengan syarat tidak merusak alam dan membawa seperlunya saja untuk hiasan. Pada sore hari, pengunjung akan menyaksikan warga sekitar mulai berdatangan mencari kerang laut atau yang disebut poka. Pengunjung juga bisa turut serta mencari kerang laut bersama warga. Warga yang mencari kerang laut tidak menggunakan peralatan yang membahayakan makhluk laut lain atau tidak merusak ekosistem laut sehingga aman dan kelestarian Pantai Toronipa tetap terjaga dan alami.



Gambar 7. Pantai Toronipa di Kecamatan Soropia

b. Pulau Bokori

Pulau bokori dikenal sebaga tempat wisata sejak akhir mei 2019. sejak banyak wisatawan yang berkunjung ke pulau bokori pemerintah Kabupaten konawe mendukung secara penuh perubahan pulau Bokori. Perubahan pulau bokori oleh pemerintah setempat dengan menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata andalan di Sulawesi Tenggara, mengakibatkan masyarakat setempat memanfaatkan peluang tersebut untuk memperoleh penghasilan tambahan dari keberadaan wisata pulau bokori tersebut. Berkembangnya pariwisata akan memberikan banyak pengaruh bagi masyarakat yang tinggal dilokasi pariwisata itu sendiri. Sebagian besar masyarakat adalah masyarakat bajo. Kegiatan usaha yang dilakukan tersebut oleh sebagian besar masyarakat sekitar dijadikan sebagai mata pencaharian utama/pokok. Jenis usaha yang dilakukan berdampak positif bagi mereka. Peluang-peluang ekonomi tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat Bajo untuk mencari tambahan pendapatan dalam rangka memenuhi keluarga. Pulau bokori sebagai tempat wisata mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui unit-unit usaha yang timbul akibat adanya wisata. Jenis-jenis usaha yang terbentuk yaitu usaha jasa penyeberangan, usaha pedagang kaki lima, usaha penyewaan tikar dan usaha penyewaan banana boat. danya wisata pulau Bokori, masyarakat Bajo ada yang mengalami perubahan mata pencaharian dan ada juga yang mengalami nafkah ganda. Jenis pekerjaan masyarakat Bajo yang mengalami perubahan dari nelayan berubah menjadi pekerjadi jasa penyeberangan wisatawan ke pulau Bokori. Hal ini karena menurut responden bahwa pekerjaan sebagai jasa penyeberangan lebih menguntungkan dari pendapatan, selain itu juga pekerjaan ini juga sangat mudah dilakukan karena jaraknya dekat, sehingga bias hemat tenaga juga menghemat

tbiaya. Sehingga perahu-perahu mereka untuk melaut mereka alihkan untuk dijadikan sebagai perahu pengangkut wisatawan ke pulau Bokori. Sedangkan jika mereka bekerja sebagai nelayan tangkap, biaya dan tenaga juga sangat besar, selain itu juga hasilnya tidak terlalu memuaskan. Bahkan kadang melaut tidak bisa dilakukan jika keadaan cuaca tidak baik. Sehingga masyarakat yang terlibat dalam unit usaha jasa penyeberangan sudah tidak lagi bekerja sebagai nelayan. Sedangkan masyarakat lain menjadikan pekerjaan yang terkait dengan wisata pulau Bokori itu sebagai pekerjaan tambahan. Mereka juga tetap bekerja sebagai nelayan. Alasan nyakarena pekerjaan di sektor wisata pulau bokori ituhanya dikerjakan * saat hari-hari libur saja.



Gambar 8. Pulau Bokori

c. Puncak Ahuawali

Bukit Ahuawali yang berlokasi di Desa Ahuawali, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara, merupakan salah satu destinasi wisata berbasis alam yang berada di kawasan konservasi Taman Nasional Rawa Aopa

Watumohaidan berbatasan dengan Desa Ahuawali sebagai desa penyangga. Bukit Ahuawali dikelola oleh Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai bekerja sama dengan masyarakat Desa Ahuawali dan sekitarnya. Kegemaran orang saat ini dalam melakukan foto dan vlog untuk keperluan konten media sosial menjadi salah satu peran penting dalam mempromosikan Bukit Ahuawali. Eksistensi pesona keindahan Bukit Ahuawali dapat ditemukan di media sosial (terutama instagram) karena fenomena alamnya yang bagus yaitu awan/kabut tebal yang mengelilingi bukit yang jarang ditemukan di tempat lain, sehingga Bukit Ahuawali mendapat julukan 'negeri di atas awan'. Selain dari segi pemandangan, Puncak Ahuawali yang berada di Bukit Ahuawali tidak terlalu tinggi (+330 mdpl) sehingga hanya memerlukan peralatan dasar untuk mendaki. Semakin banyak frekuensi kata pada gambar menunjukkan semakin banyak yang menyatakan kata tersebut sebagai tujuan utama kedatangannya ke Bukit Ahuawali. Kata camping dan wisata menjadi pilihan tujuan utama pengunjung datang ke Bukit Ahuawali. Ketertarikan pengunjung untuk melakukan kunjungan Ahuawali salah satu faktornya adalah karena daya tarik dari Bukit Ahuawali. Berdasarkan hasil dari jawaban sresponden didapatkan hasil daya tarik Bukit Ahuawali meliputi:

- 1) Awan, Kabut, Embun;
- 2) Pemandangan;
- 3) Sabana, Landscape, Flora, Pegunungan, Bukit;
- 4) Sunrise Dan Sunset;
- 5) Udara Segar, Suasana, Asri;
- 6) Camping;
- 7) Tracking;

- 8) Unik. Daya tarik utama bukit Ahuawali adalah awanyang terbentuk dari kabut terutama saat pagi hari. Ketika berada di Puncak Ahuawali serasa berada di negeri atas awan.



Gambar 9. Puncak Ahuawali

4.2.6 Pertambangan

Penambangan nikel di Sulawesi Tenggara telah memainkan peran yang signifikan dalam ekonomi daerah. Pada tahun 2022, total nilai ekspor nikel dari Sulawesi Tenggara mencapai US\$4,8 miliar, sebuah angka yang menunjukkan betapa pentingnya industri ini bagi ekonomi lokal dan nasional. Ini juga berarti peningkatan lapangan pekerjaan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Konawe adalah produsen nikel terbesar di provinsi ini. Sejarah tambang nikel Sulawesi ini tidak lepas dari peran Kabupaten Konawe yang sudah lama menjadi pusat penambangan. Kecamatan-kecamatan seperti Ranomeeto, Sampara, dan Andowia adalah lokasi utama penambangan nikel di sini. Pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengelola aktivitas pertambangan nikel secara berkelanjutan. Pengelolaan tambang nikel berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan

tenaga kerja di Kabupaten Konawe pengelolaan tambang nikel yang baik direfleksikan melalui penerapan teknik penambangan yang tepat, peduli lingkungan, peduli kesehatan dan keselamatan kerja, penerapan prinsip konservasi dan mempunyai nilai tambah, sehingga mempunyai kontribusi positif dan signifikan pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Kemudian fakta lapangan menunjukkan bahwa ketentuan bijih nikel sebagai salah satu sumber daya alam dalam industri pertambangan karena dipandang memberikan pendapatan asli daerah yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan pembangunan, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan masyarakat luar lokasi penambangan.

Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjalankan aktivitas pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara secara berkelanjutan:

1. Meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan penambangan.
2. Penerapan teknologi limbah yang lebih ramah lingkungan.
3. Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif pertambangan nikel.



Gambar10. perusahaan tambang di Kabupaten Konawe

4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan atau pembangunan Desa di Kabupaten Konawe

Pembangunan desa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks, dan faktor-faktor ini dapat bervariasi dari satu desa ke desa lainnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, faktor pembangunan di Kabupaten Konawe dapat dilihat pada table 4.1 berikut.

No	Faktor	Kategori Capain	Alasan
1	Proses Pembangunan Desa di Kabupaten Konawe telah menggunakan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan Desa	Baik	Tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan desa adalah bagian integral dari proses pembangunan desa di Kabupaten Konawe, dan mereka dianggap faktor penting dalam pembangunan desa karena mereka memengaruhi dan membentuk hasil akhir pembangunan desa. Mengapa tahapan ini dianggap sebagai faktor pembangunan yang penting dan telah di laksanakan di Kabupaten Konawe: 1. Perencanaan: Tahap perencanaan merupakan landasan pembangunan desa. Dalam proses ini, tujuan dan sasaran pembangunan desa ditetapkan, serta

		<p>strategi, program, dan anggaran yang diperlukan untuk mencapainya. Perencanaan yang matang memungkinkan sumber daya yang terbatas digunakan dengan efisien dan efektif. Selain itu, perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat setempat juga dapat menciptakan rasa kepemilikan dan dukungan masyarakat terhadap pembangunan desa. 2. Pelaksanaan: Tahap pelaksanaan melibatkan implementasi proyek dan program yang telah direncanakan. Ini melibatkan koordinasi, pengawasan, dan manajemen yang baik untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut berjalan sesuai rencana. Pelaksanaan yang baik akan memastikan bahwa sumber daya dan upaya yang diinvestasikan dalam pembangunan desa memberikan hasil yang diharapkan. 3. Pemeliharaan: Tahap pemeliharaan adalah langkah berkelanjutan yang memastikan hasil-hasil pembangunan desa terjaga dan</p>
--	--	---

		<p>bermanfaat dalam jangka panjang. Ini termasuk pemeliharaan infrastruktur, pengembangan kapasitas masyarakat, dan perawatan aset-aset yang telah dibangun. Pemeliharaan yang baik akan memastikan berkelanjutan dan keberlanjutan hasil pembangunan desa.</p> <p>Ketiga tahap ini bekerja bersama untuk mencapai hasil pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Jika salah satu tahapan tidak berjalan dengan baik, hasil pembangunan desa dapat terganggu atau bahkan gagal mencapai tujuannya.</p> <p>Selain itu, penting untuk diingat bahwa pembangunan desa bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan yang baik juga memungkinkan integrasi berbagai aspek ini untuk mencapai pembangunan desa yang holistik dan berkelanjutan.</p>
--	--	--

2	Sumber daya alam yang terdiri dari luas lahan yang dimiliki oleh masyarakat, hasil dan jenis komoditi tanaman pertaniandan jumlah tangkapan ikan	Baik	Berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Konawe Karena: Pertama , Kontribusi terhadap Perekonomian. Pertanian dan perikanan adalah sektor ekonomi utama di banyak desa dan Kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe. Hasil pertanian dan hasil perikanan merupakan sumber pendapatan utama bagi sebagian besar masyarakat di sana. Peningkatan produktivitas dan diversifikasi komoditas pertanian dan perikanan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa. Kedua , Sektor pertanian dan perikanan biasanya menciptakan banyak lapangan kerja langsung dan tidak langsung. Meningkatnya produksi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan memberikan peluang kerja kepada masyarakat setempat.
---	--	------	---

			<p>Ketiga, Sumber daya alam seperti lahan pertanian dapat digunakan untuk memproduksi bahan makanan yang sangat penting bagi ketahanan pangan lokal. Ketahanan pangan adalah faktor penting dalam pembangunan karena dapat mengurangi kerentanan terhadap kelaparan dan ketidakstabilan pangan.</p> <p>Kempat, Upaya pengelolaan sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan adalah bagian integral dari pembangunan. Memastikan bahwa tanah pertanian, hutan, dan perairan tidak dieksploitasi berlebihan membantu menjaga lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam untuk generasi mendatang.</p> <p>Kelima Pemberdayaan masyarakat melalui kepemilikan lahan pertanian atau perikanan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi yang penting. Hal ini dapat membantu meningkatkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya</p>
--	--	--	--

			alam seperti lahan pertanian dan hasil perikanan adalah faktor pembangunan penting di Kabupaten Konawe karena mereka memiliki dampak langsung pada ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan ketahanan pangan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam ini dengan bijak dapat mempercepat pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.
3	Sumber manusia yang terdiri dari tingkat pendidikan yang diselesaikan dan kemampuan akan keterampilan yang dimiliki masyarakat	Cukup Baik	Kemampuan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat adalah faktor pendukung pembangunan yang sangat penting karena berperan krusial dalam memfasilitasi dan meningkatkan efektivitas berbagai aspek pembangunan. Beberapa aspek yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Konawe adalah: Produktivitas , masyarakat yang memiliki pendidikan yang baik dan keterampilan yang relevan lebih cenderung menjadi pekerja yang lebih produktif dalam sektor-sektor ekonomi yang beragam. Inovasi dan Teknologi , keterampilan

			<p>khusus memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses informasi, memahami teknologi, dan berkontribusi pada inovasi dalam berbagai sektor. Ini penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan teknologi di masyarakat.</p> <p>Kualitas Tenaga Kerja, masyarakat yang keterampilan yang relevan memiliki potensi untuk memberikan tenaga kerja berkualitas tinggi. Ini dapat menarik investasi dari sektor swasta dan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.</p> <p>Peningkatan Kapasitas, keterampilan meningkatkan kapasitas individu untuk memahami, mengelola, dan mengambil keputusan yang bijak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, keuangan, dan lingkungan.</p> <p>Kemampuan Beradaptasi sumber daya manusia yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan keterampilan yang baik cenderung lebih baik dalam beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan</p>
--	--	--	--

			<p>ekonomi dan sosial. Ini penting untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat, pendidikan dan keterampilan memberdayakan individu dan masyarakat untuk mengambil kontrol atas kehidupan mereka sendiri, termasuk partisipasi dalam proses pembangunan lokal dan nasional.</p>
4	Ekonomi yang terdiri dari pajak dan pendapatan masyarakat	Baik	<p>Ekonomi yang melibatkan pajak dan pendapatan masyarakat di Kabupaten Konawe adalah faktor pendukung pembangunan karena mereka berperan penting dalam membiayai program dan proyek pembangunan serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk memberikan layanan dan infrastruktur yang diperlukan bagi masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumber Pendanaan Pembangunan; Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah, yang dapat digunakan untuk mendukung

			<p>program pembangunan, proyek infrastruktur, dan layanan masyarakat. Pendapatan ini membantu dalam membiayai berbagai inisiatif yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Infrastruktur; Pajak yang diterima oleh pemerintah daerah dapat digunakan untuk membangun dan memelihara infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, dan listrik. Infrastruktur yang baik adalah prasyarat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. • Pelayanan Publik; Pendapatan dari pajak dan penerimaan lainnya dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Hal ini membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan akses terhadap layanan penting.
--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> • Stabilitas Ekonomi; Pendapatan dari pajak dapat membantu menciptakan stabilitas ekonomi di wilayah tersebut. Ini memungkinkan pemerintah untuk mengatasi tantangan ekonomi yang mungkin timbul dan menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan. • Pendapatan Masyarakat; Pendapatan yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat dari aktivitas ekonomi mereka juga berperan dalam pembangunan. Meningkatnya pendapatan masyarakat memungkinkan mereka untuk meningkatkan standar hidup, mendukung pendidikan, dan mengakses layanan kesehatan yang lebih baik. • Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi; Pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dapat digunakan untuk memikat investasi dari sektor swasta, yang
--	--	--	---

			<p>dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pajak sebagai Alat Kebijakan; Pajak juga dapat digunakan sebagai alat kebijakan untuk mengatur perilaku ekonomi. Ini termasuk pengenaan pajak untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan mendorong praktik yang berkelanjutan.
5	<p>Pelayanan publik yang terdiri dari pelayanan dalam realisasi pembangunan, pelayanan kinerja aparat, ketepatan waktu pelayanan administrasi, pelayanan ketersediaan sarana dan prasarana</p>	Baik	<p>Pelayanan publik yang mencakup realisasi pembangunan, kinerja aparat, ketepatan waktu pelayanan administrasi, dan ketersediaan sarana dan prasarana adalah faktor pendukung pembangunan di Kabupaten Konawe karena berperan kunci dalam menyediakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang efisien, efektif, dan berkelanjutan.</p> <p>1. Realisasi Pembangunan; Pelayanan publik yang baik dan efisien dalam realisasi proyek dan program pembangunan memungkinkan investasi</p>

		<p>sumber daya dan anggaran yang efektif. Ini memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan selesai dengan baik dan sesuai dengan rencana, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>2. Kinerja Aparat; Kinerja aparat pemerintah yang baik adalah kunci untuk menjalankan program-program pembangunan. Aparat yang kompeten dan berintegritas dapat memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efisien dan bahwa kebijakan dan program pemerintah diimplementasikan dengan baik.</p> <p>3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana; Sarana dan prasarana yang memadai, seperti jalan, komunikasi, listrik, air bersih, dan fasilitas lainnya, merupakan infrastruktur penting yang mendukung proses pembangunan. Mereka memungkinkan akses ke wilayah-wilayah terpencil, memfasilitasi transportasi barang dan jasa, dan meningkatkan</p>
--	--	---

			<p>kualitas hidup masyarakat.</p> <p>4. Partisipasi Masyarakat; Pelayanan publik yang inklusif dan terbuka kepada partisipasi masyarakat adalah faktor pendukung dalam pembangunan yang berkelanjutan. Masyarakat yang merasa diberdayakan dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan memiliki kepentingan dalam pembangunan yang berkelanjutan.</p>
6	<p>Partisipasi masyarakat yang meliputi keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa lewat kehadiran rapat, ketersediaan memberi bantuan tenaga, uang, bahan, dan pemeliharaan dan menjaga pembangunan</p>	Sangat Baik	<p>Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa, yang meliputi keterlibatan dalam rapat, memberikan bantuan tenaga, uang, bahan, serta pemeliharaan dan menjaga pembangunan, dianggap sebagai faktor pendukung pembangunan di Kabupaten Konawe berperan penting dalam memfasilitasi, mendukung, dan memajukan pembangunan. Partisipasi masyarakat Kabupaten Konawe berupa: Keterlibatan dalam Perencanaan:</p>

		<p>Partisipasi masyarakat dalam rapat-rapat perencanaan pembangunan memungkinkan mereka untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasi mereka. Hal ini memastikan bahwa proyek-proyek dan program pembangunan yang direncanakan memenuhi kebutuhan riil masyarakat, sehingga lebih mungkin berhasil.</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat: Melalui partisipasi, masyarakat merasa diberdayakan dan memiliki kontrol lebih besar atas pembangunan di wilayah mereka. Ini dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap proyek-proyek dan program pembangunan serta mendorong tanggung jawab masyarakat terhadap pemeliharaan dan keberlanjutan hasil pembangunan.</p> <p>Sumber Daya Tambahan: Keterlibatan masyarakat dalam memberikan bantuan tenaga, uang, atau bahan secara sukarela dapat menyediakan sumber daya tambahan untuk pembangunan yang mungkin tidak</p>
--	--	--

			<p>tersedia melalui anggaran pemerintah. Ini membantu mempercepat proyek-proyek pembangunan dan mengurangi beban fiskal.</p> <p>Pemeliharaan dan Keberlanjutan: Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan menjaga pembangunan yang sudah ada adalah faktor penting dalam memastikan bahwa hasil pembangunan dipertahankan dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Masyarakat yang terlibat dalam perawatan infrastruktur dan fasilitas akan lebih cenderung menjaga aset tersebut.</p> <p>Legitimitas dan Dukungan: Partisipasi masyarakat memungkinkan pembangunan untuk mendapatkan dukungan lebih besar dan legitimasi di mata masyarakat. Proyek-proyek yang dirancang dengan partisipasi masyarakat cenderung lebih diterima dan didukung oleh masyarakat.</p> <p>Peningkatan Kualitas Pembangunan: Partisipasi masyarakat dapat membantu meningkatkan kualitas pembangunan. Dengan memasukkan</p>
--	--	--	--

			<p>pengetahuan dan pengalaman lokal, solusi-solusi yang lebih sesuai dengan konteks setempat dapat ditemukan. Partisipasi masyarakat bukan hanya faktor pendukung pembangunan, tetapi juga prinsip dasar dalam praktik pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Melibatkan masyarakat dalam pembangunan memberikan mereka peran yang aktif dan memiliki dalam proses tersebut, dan ini dapat memastikan bahwa pembangunan mencapai tujuannya dengan lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat yang dilibatkan.</p>
7	Dana desa dan pengelolaan dana desa	Baik	<p>Dana desa dan pengelolaan dana desa di Kabupaten Konawe dianggap sebagai faktor pendukung pembangunan karena mereka memiliki peran yang krusial dalam membiayai dan memajukan berbagai inisiatif pembangunan di tingkat desa. Berikut adalah alasan mengapa dana desa dan pengelolaannya dianggap sebagai faktor pendukung pembangunan:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Pendanaan Lokal: Dana desa adalah sumber pendanaan lokal yang signifikan untuk pembangunan di tingkat desa. Dana ini diberikan kepada desa-desa untuk mendukung program-program pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Ini memungkinkan desa untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. • Partisipasi Masyarakat: Program dana desa sering melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek-proyek pembangunan. Ini memungkinkan partisipasi masyarakat dalam menentukan prioritas dan kebijakan pembangunan di desa mereka. • Pemberdayaan Lokal: Dana desa dapat meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan pemerintah desa
--	--	--	---

			<p>dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan. Hal ini membantu dalam mempercepat proses pembangunan di tingkat desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur Dasar: Dana desa dapat digunakan untuk membangun dan memelihara infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya. • Infrastruktur yang baik adalah prasyarat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. • Pendidikan dan Kesehatan: Dana desa dapat dialokasikan untuk sektor pendidikan dan kesehatan di desa. Ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. • Pemberdayaan Ekonomi: Dana desa dapat digunakan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah di
--	--	--	---

			<p>desa, yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan Ketimpangan: Dana desa dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Konawe dengan memberikan sumber daya kepada desa-desa yang mungkin kurang berkembang. Ini dapat meningkatkan inklusi sosial dan ekonomi. • Transparansi dan Akuntabilitas: Penting untuk mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel, yang dapat membantu mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan pembangunan yang sebenarnya. Oleh karena itu, dana desa dan pengelolaannya dianggap sebagai faktor pendukung pembangunan karena mereka memfasilitasi pendanaan program-program
--	--	--	--

			<p>pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan perbaikan infrastruktur dan layanan di tingkat desa, yang semuanya berkontribusi pada pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan di Kabupaten Konawe.</p>
--	--	--	---

4.4 Model Komunikasi Pembangunan dalam Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Konawe

4.4.1 Dana Desa Di Kabupaten Konawe

Pengajuan dokumen Pencairan Dana Desa yang diajukan oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat, lalu dilanjutkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(DPMD), Lalu dilanjutkan kepada Badan keuangan Daerah(BKD). Selanjutnya BKD melalui Bendahara Pengeluaran melakukan transfer Dana Desa melalui rekening pemerintah Desa. Alur pencairan Dana Desa Di Kabupaten Konawe tidak ada kendala yang signifikan, karena semua prosedur dan alur kerja penyusunan dokumen sudah ditetapkan waktunya, mulai dari menyusun RKPDesa, APB desa, dan dokumen lainnya. Hambatan adalah kesiapan Pemda(pemerintah Daerah) dalam menerima dokumen pencairan dari Dana Desa karena Pemda harus mempersiapkan segala sesuatu untuk menerima transfer Anggaran Dana Desa(ADD) dari pemerintah pusat, yang seringkali menyebabkan keterlambatan pencairan dana kepada Pemerintahan Desa yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan dan pencairan tahap berikutnya.

Teknis dan ketentuan penyaluran Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 50/PMP/07/2017 tentang pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan peraturan menteri keuangan No 12/PMK.07/2017 pasal 1 ayat 1 dan ayat 6. Pencairan dana desa terbagi menjadi 3 tahap: **tahap pertama 40%** dari seluruh dana, **tahap kedua 30%**, dan **Tahp ketiga 30%**.

4.4.2 Output Dana Desa di Kabupaten Konawe

Pengelolaan dana desa yang telah di lakukan di Kabupaten konawe menghasilkan banyak output diantaranya:

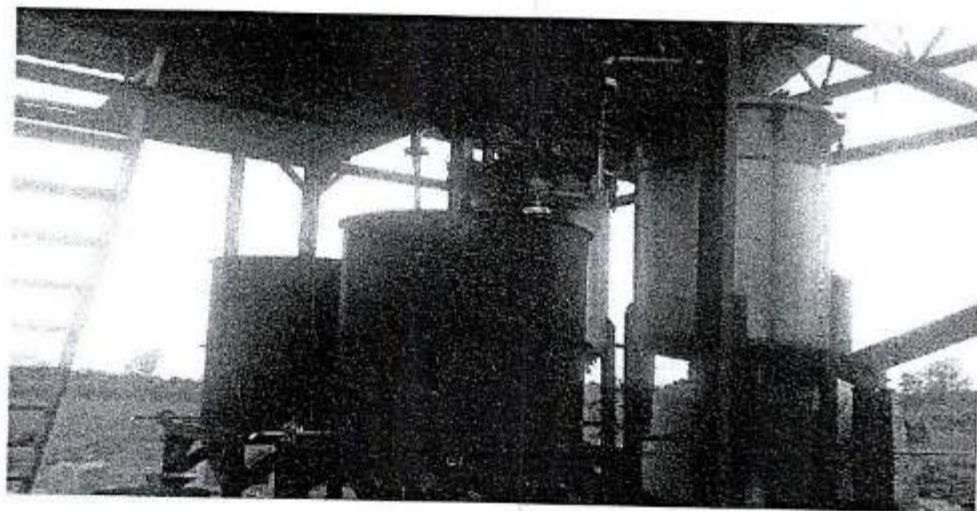


Gambar 11: output dana desa di Kabupaten Konawe

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

BUMDES memiliki potensi besar untuk memberdayakan masyarakat desa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat

setempat. Selain itu, BUMDES juga dapat berperan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Konawe dengan mengelola sumber daya alam dan budaya secara berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Seperti Bumdes Desa Lawonua yang menggunakan dana desa dengan menjalankan penyulingan minyak nilam yang di kelola oleh masyarakat pengurus BUMDes, dan di manfaatkan oleh seluru masyarakat desa lawonua Kecamatan Besulutu yang sebagian besar berprofesi sebagai petani nilam. Contoh lain usaha BUMDes di Kabupaten konawe adalah membuat usaha penyewaan tenda besi dan sound system. Usaha jenis ini banyak di jaiin BUMDes di Kabupaten Konawe seperti di desa Puulowaru. Usaha-usaha lain BUMDes juga banyak ditemukan seperti Bumdes yang menjual alat pertanian dan pemberantas hama pertanian. Selain itu ada juga BUMDes yang memberdayakan ibu rumah tangga dengan membuka usaha jahit.



Gambar 12. Penyulingan nilam usaha bumdes

2. Pondok Bersalin dan posyandu

Pondok bersalin di Konawe yang dibangun dengan dana desa adalah salah satu contoh penggunaan dana desa untuk meningkatkan layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pondok bersalin merupakan fasilitas yang penting untuk membantu ibu hamil dalam proses persalinan yang aman dan menyediakan perawatan pasca persalinan. Berikut narasi mengenai pembangunan pondok bersalin di Konawe dengan dana desa.

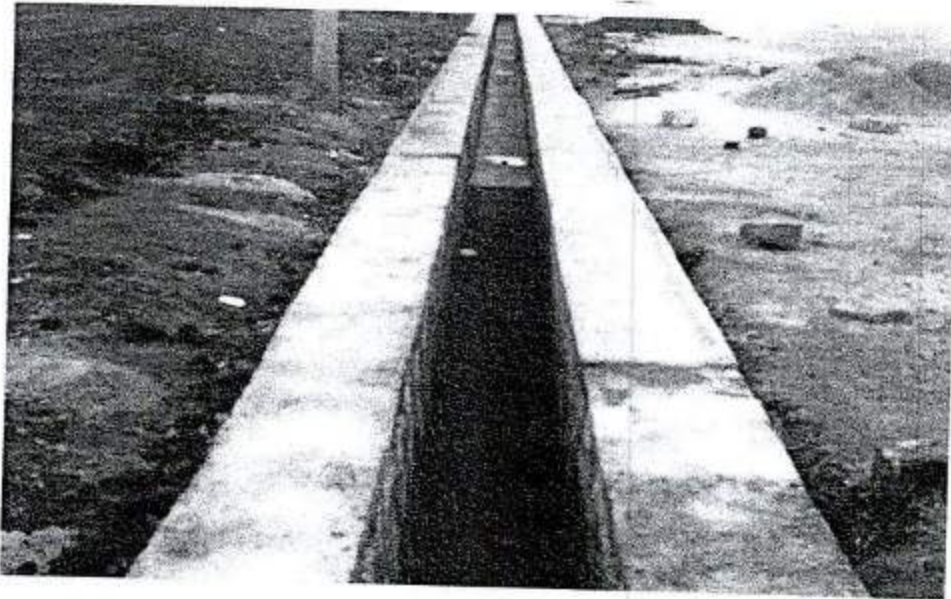
Dengan dana desa yang telah dialokasikan, pemerintah desa memulai proyek pembangunan pondok bersalin ini. Masyarakat desa secara aktif terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek ini, termasuk dalam pemilihan lokasi yang strategis dan perancangan fasilitasnya. Pendanaan dana desa digunakan untuk membangun struktur fisik pondok bersalin, termasuk kamar persalinan, kamar pasca persalinan, ruang tunggu, dan fasilitas kesehatan lainnya. Selain itu, dana tersebut digunakan untuk membeli peralatan medis yang diperlukan, seperti alat-alat persalinan dan perawatan bayi yang baru lahir.

Pembangunan pondok bersalin ini menjadi bukti nyata dari bagaimana dana desa dapat digunakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang penting. Pondok bersalin baru ini memberikan kemudahan bagi ibu hamil dan pasien untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Hal ini juga meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perawatan kesehatan maternal dan bayi.

3. Drainase

Pembangunan drainase di Kabupaten Konawe adalah salah satu langkah penting dalam upaya meningkatkan infrastruktur dan mengatasi masalah yang berkaitan

dengan pengelolaan air. Drainase ini bertujuan untuk mengatasi genangan air, melindungi lahan pertanian, dan memastikan kualitas hidup masyarakat setempat. Proyek pembangunan drainase dimulai dengan identifikasi wilayah-wilayah yang paling terdampak oleh genangan air dan jalan yang rusak karena air. Wilayah-wilayah ini kemudian menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan sistem drainase yang efektif. Proyek drainase melibatkan pembuatan saluran drainase, parit, dan pipa yang dirancang untuk mengalirkan air hujan yang berlebihan keluar dari pemukiman dan lahan pertanian. Struktur-struktur ini ditempatkan secara strategis agar air dapat dialirkan dengan aman dan efisien ke sungai-sungai atau sistem pembuangan air yang ada.



Gambar 13 :Drainase di kabupaten konawe

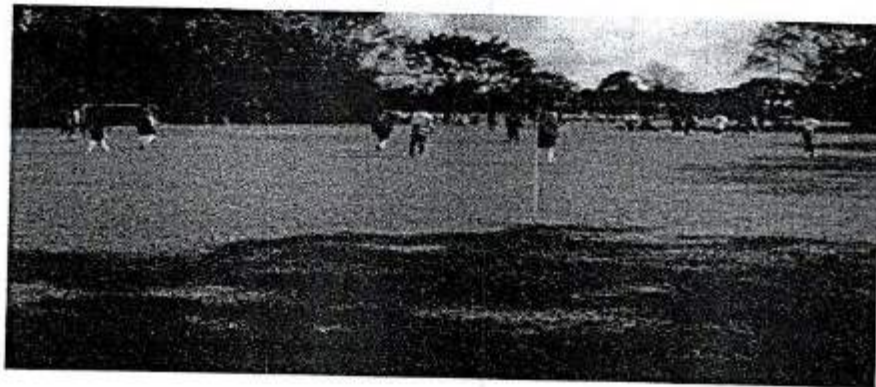
4. Sumur Warga Dan Air Bersih

Pembangunan sumur warga di Kabupaten Konawe dengan menggunakan dana desa adalah salah satu contoh bagaimana sumber daya lokal dapat digunakan

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan meningkatkan kualitas hidup. Beberapa daerah yang mengalami kesulitan dengan air bersih mengalokasikan dana desa yang dimiliki untuk membangun sumur warga. Pendanaan dana desa yang telah dialokasikan untuk proyek pembangunan sumur warga ini menjadi titik balik penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Proses dimulai dengan penyusunan rencana oleh pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan lokasi dan jenis sumur yang akan dibangun. Dana desa digunakan untuk membangun beberapa sumur bor di sejumlah lokasi strategis di desa. Sumur-sumur ini dirancang untuk mengebor hingga ke lapisan air tanah yang bersih dan aman untuk diminum.

5. Sarana olahraga

Partisipasi aktif masyarakat Kabupaten Konawe, memutuskan untuk menggunakan dana desa untuk membangun fasilitas olahraga yang layak. Mereka memulai dengan merancang rencana pembangunan, termasuk pemilihan lokasi yang sesuai dan perencanaan konstruksi. Dana desa yang dialokasikan untuk proyek ini digunakan untuk membiayai pembangunan lapangan olahraga, seperti lapangan sepak bola, lapangan bulu tangkis dan takraw.



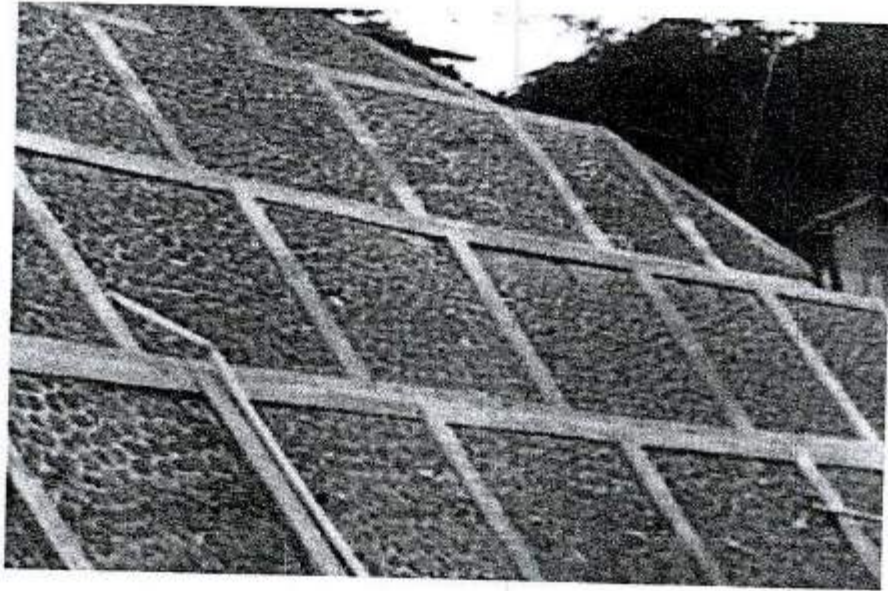
Gambar 14: Lapangan Sepak Bola

9. Menunjang Aktivitas Ekonomi Masyarakat Berupa Jalan Desa Dan Jembatan dan Pasar Desa

Pembangunan jalan desa, jembatan, dan pasar desa menggunakan Dana Desa adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terutama kabupaten atau desa, untuk meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan. Dana Desa adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada desa-desa di Indonesia untuk membiayai program pembangunan di tingkat desa. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Proses ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat dan pemantauan ketat agar proyek-proyek ini dapat berjalan dengan efisien dan bermanfaat bagi seluruh komunitas desa.

10. Peningkatan Kualitas Penahan Tanah

Peningkatan kualitas penahan tanah di Kabupaten Konawe menggunakan dana desa adalah sebuah inisiatif pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan daya tahan dan produktivitas lahan pertanian, serta mencegah erosi tanah. wilayah-wilayah di Kabupaten Konawe yang paling memerlukan perbaikan penahan tanah disebabkan oleh penilaian erosi tanah, kerusakan lahan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas tanah.



Gambar 15 . Penahan tanah di Kabupaten Konawe

4.4.3 Model komunikasi pembangunan dalam pemanfaatan dana desa di Kabupaten Konawe

Pemilihan model komunikasi pembangunan yang cocok dalam memanfaatkan dana desa mempertimbangkan partisipasi aktif masyarakat setempat, transparansi, serta pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu model komunikasi pembangunan yang relevan bagi Kabupaten Konawe adalah "Model Partisipatif." Model Partisipatif pembangunan adalah pendekatan yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek pembangunan yang dibiayai oleh dana desa. Beberapa aspek kunci dari model komunikasi partisipatif dalam pemanfaatan dana desa meliputi:

1. Partisipasi Aktif Masyarakat

Masyarakat setempat, terutama para pemangku kepentingan, seperti petani, peternak, dan penduduk desa lainnya, harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait dengan alokasi dana desa. Mereka harus memiliki kesempatan

untuk menyuarakan kebutuhan, aspirasi, dan preferensi mereka; sehingga kepentingan mereka dalam pembangunan dapat terakomodasi.

2. Keterbukaan dan Transparansi

Informasi tentang alokasi dana desa, perencanaan proyek, penggunaan dana, dan hasil proyek harus disampaikan dengan jelas kepada masyarakat. Ini mencakup penyediaan laporan keuangan yang mudah diakses dan pemahaman yang transparan tentang proses pengambilan keputusan.

3. Kapasitas Masyarakat

Masyarakat setempat harus diberikan pelatihan dan pendidikan terkait dengan pengelolaan dana desa, teknik pertanian yang berkelanjutan, dan praktik-praktik yang dapat meningkatkan hasil pertanian dan perlindungan lingkungan.

4. Partnership dengan Pihak Eksternal

Model partisipatif juga melibatkan kerja sama dengan pihak eksternal, seperti pemerintah kabupaten/kota, LSM, dan lembaga-lembaga penelitian, yang dapat memberikan bantuan teknis dan sumber daya tambahan.

5. Evaluasi Bersama

Masyarakat dan pihak berwenang setempat perlu secara berkala mengevaluasi dampak proyek dan penggunaan dana desa. Ini membantu memastikan bahwa proyek mencapai tujuan yang ditetapkan.

6. Sustainability

Model ini juga harus berfokus pada keberlanjutan jangka panjang. Masyarakat perlu diberdayakan untuk merawat dan mempertahankan infrastruktur dan praktik-praktik berkelanjutan yang dibiayai oleh dana desa.

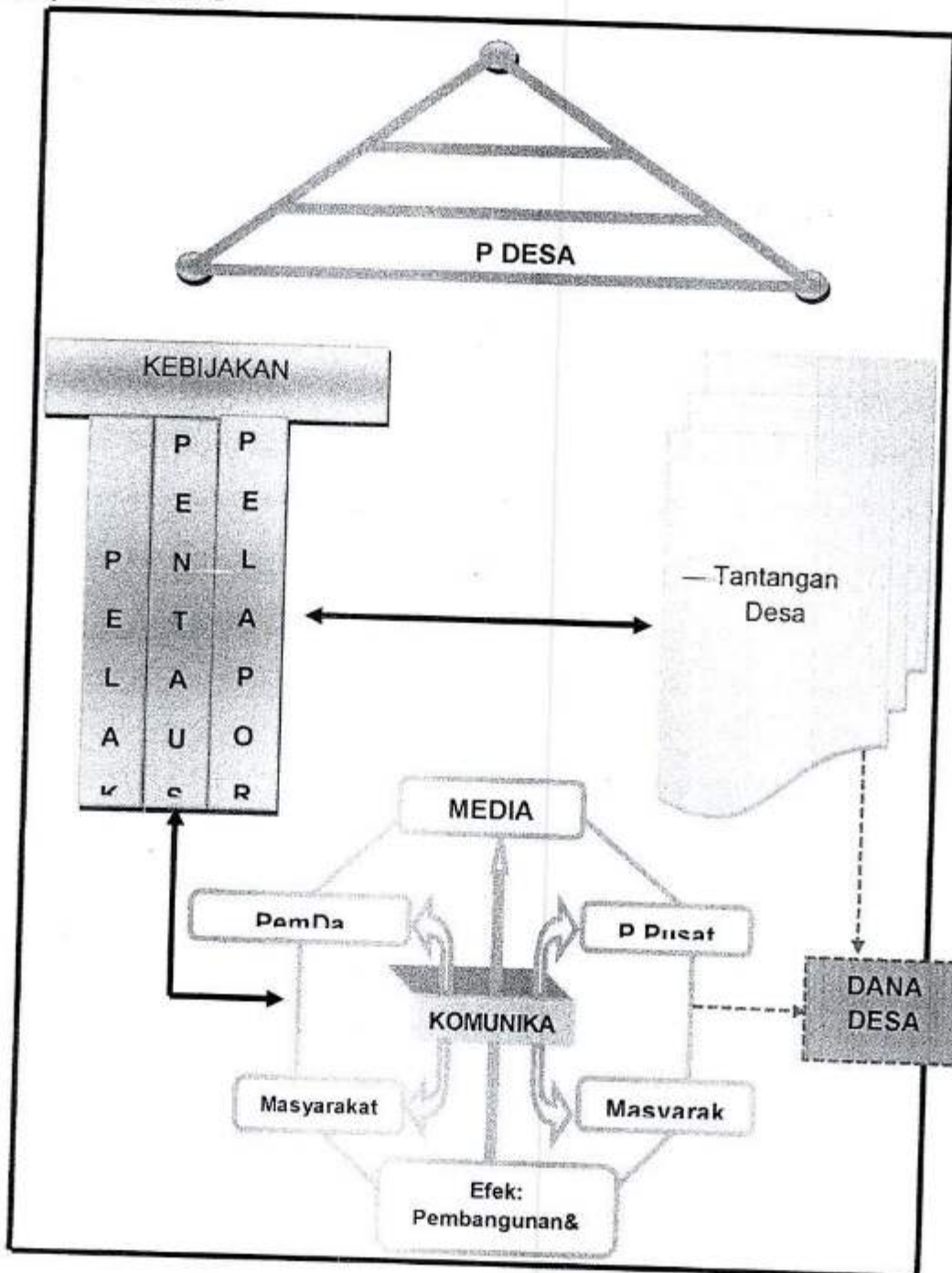
Dengan menerapkan model komunikasi pembangunan yang partisipatif, dana desa dapat digunakan secara lebih efektif dan mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat desa. Hal ini juga dapat memperkuat keterlibatan dan rasa memiliki masyarakat dalam proses pembangunan lokal. Dana desa adalah sumber pendanaan lokal yang signifikan untuk pembangunan di tingkat desa. Dana ini diberikan kepada desa-desa untuk mendukung program-program pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Ini memungkinkan desa untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Program dana desa sering melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek-proyek pembangunan. Ini memungkinkan partisipasi masyarakat dalam menentukan prioritas dan kebijakan pembangunan di desa mereka.

Dana desa dapat meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan pemerintah desa dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan. Hal ini membantu dalam mempercepat proses pembangunan di tingkat desa. Dana desa dapat digunakan untuk membangun dan memelihara infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya. Infrastruktur yang baik adalah prasyarat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pendidikan dan Kesehatan: Dana desa dapat dialokasikan untuk sektor pendidikan dan kesehatan di desa. Ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Dana desa dapat digunakan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah di desa, yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dana desa dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Konawe dengan

memberikan sumber daya kepada desa-desa yang mungkin kurang berkembang. Ini dapat meningkatkan inklusi sosial dan ekonomi.

Transparansi dan Akuntabilitas: Penting untuk mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel, yang dapat membantu mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan pembangunan yang sebenarnya. Oleh karena itu, dana desa dan pengelolaannya dianggap sebagai faktor pendukung pembangunan karena mereka memfasilitasi pendanaan program-program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan perbaikan infrastruktur dan layanan di tingkat desa, yang semuanya berkontribusi pada pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan di Kabupaten Konawe. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam bagan berikut sebuah model komunikasi pembangunan dalam pemanfaatan dana desa di Kabupaten Konawe:

Bagan: Model Komunikasi Pembangunan Dalam Pemanfaatan Dana Desa Di Kabupaten Konawe



Bagan 3: Model komunikasi pembangunan di Kabupaten Konawe

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dana Desa merupakan program Pemerintah Pusat yang dapat memberikan banyak manfaat terhadap kemajuan Desa dan kesejahteraan masyarakat. Hal yang terpenting dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa adalah mekanisme penyalurandan pengalokasian dana sesuai dengan skala prioritas di Pemerintahan Desa, terjalinnnya kerjasama yang baik antara setiap elemen yang terkait dalam pelaksanaan Anggaran Dana Desa(ADD), serta pengawasan yang tepat dan sesuai dengan kewenangan terhadap setiap kegiatan yang didanai oleh Anggaran Dana Desa(ADD).

Dana Desa merupakan program Pemerintah Pusat yang dapat memberikan banyak manfaat terhadap kemajuan Desa dan kesejahteraan masyarakat. Hal yang terpenting dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa adalah mekanisme penyaluran dan pengalokasian dana sesuai dengan skala prioritas di Pemerintahan Desa, terjalinnnya kerjasama yang baik antara setiap elemen yang terkait dalam pelaksanaan Anggaran Dana Desa (ADD), serta pengawasan yang tepat dan sesuai dengankewenangan terhadap setiap kegiatan yang didanai oleh Anggaran Dana Desa(ADD).

Kabupaten Konawe adalah daerah yang kaya. dengan luas 5.512,49 km² , yang terdiri dari 27 Kecamatan 57 Kelurahan dan 297 desa. dengan jumlah jiwa sebanyak 266.299 jiwa. potensi Kabupaten Konawe sangat banyak beberapa diantaranya adalah bidang pertanian, perikanan peternakan, perkebunan, pariwisata, Dan pertambangan. beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan di Kabupaten Konawe adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia, ekonomi pelayanan publik, partisipasi

masyarakat, dana desa dan pengelolaan dana desa. pembangunan dengan menggunakan dana desa di Kabupaten Konawe telah menghasilkan banyak output diantaranya badan usaha milik desa, Pondok bersalin dan posyandu, drainase, sumur warga dan air bersih, sarana olahraga, sarana MCK, irigasi, Jalan Desa dan jembatan desa, Serta peningkatan kualitas penahan tanah. model komunikasi pembangunan dengan memanfaatkan dana desa yang tepat dimanfaatkan di Kabupaten Konawe adalah model partisipatif yakni pendekatan yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan proyek yang dibiayai oleh dana desa.

5.2 Rekomendasi

1. Memaksimalkan Potensi Kabupaten Konawe:

Mengidentifikasi dan mendukung sektor-sektor unggulan atau peluang investasi yang ada di Kabupaten Konawe, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, atau industri lokal. Serta mendorong inovasi dan pelatihan untuk pengembangan SDM agar lebih sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor unggulan tersebut.

2. Optimalisasi Faktor Pendukung Pembangunan:

Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor pendukung pembangunan yang telah mencapai hasil baik dan mengidentifikasi area-area di mana masih ada ruang untuk perbaikan. Mengoptimalkan infrastruktur dan fasilitas pendukung, seperti jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi untuk memudahkan akses dan konektivitas.

3. Pengelolaan Dana Desa:

Terus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, termasuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan

terkait penggunaan dana desa. Memberikan pelatihan dan dukungan kepada masyarakat setempat untuk memahami dan mengelola dana desa dengan baik.

4. Peningkatan Model Komunikasi Pembangunan Partisipatif:

Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan melalui pertemuan, diskusi, dan konsultasi yang terstruktur. Membentuk forum komunikasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk merancang strategi pembangunan yang lebih inklusif. Selain itu, penting untuk melanjutkan pemantauan dan evaluasi progres pembangunan serta mendengarkan masukan dari masyarakat secara terus-menerus. Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, Kabupaten Konawe dapat lebih efektif memaksimalkan potensinya dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2004, *Metodologi Penelitian Sosial & Hukum*, Jakarta: Granit.
- Bungin, 2007., *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Moleong, Lexy, J, 2004, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung; Remaja Rosda Karya.
- Adisasmita, Raharjo. 2014. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Harun, Rochajat H. dan Elvirano Ardianto. 2012. *Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial: Perspektif Dominan, Kaji Ulang, dan Teori Kritis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Emil Salim, "Paradigma Pembangunan Berkelanjutan", dalam Iwan Jaya Azis, Lydia M. Napitupulu, Arianto Patunru, dan Budi Reksosudarmo, *Pembangunan Berkelanjutan, Peran dan Kontribusi Emil Salim*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2010, halaman 21 – 30
- Nasution, Zulkarimen. 2002. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hamid, Hendrawati. 2018. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca
- Mardikanto, Totok. 1982. *Pengantar Penyuluhan Pertanian*. Surakarta: Hapsara Mardikanto
- Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Pumamasari, A. M. (2011). Pengembangan Masyarakat Untuk Pariwisata di Kampung Wisata Toddabojo Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal of Regional and City Planning*, 22(1), 49–64. Retrieved from <http://journals.itb.ac.id/index.php/jpwwk/article/view/4133>
- Sefira Ryalita Primadany, Mardiyono, R. (2013a). Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah. *Administrasi Publik*, 1(4), 135–143.
- Tamaraitka, F., & Rosyidie, A. (2019). Inkorporasi Kearifan Lokal Dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata di Lingkungan Pantai. *Jurnal Sositologi*, 16(1), 125–133.

- Widodo, N. (2016). Perencanaan Pembangunan Pariwisata di Daerah (Studi Pelaksanaan Program pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2(4), 227–235
- Fauzi A, (2004) "Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan", PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Keraf A.S.,(2002) "Etika Lingkungan", Penerbit Buku Kompas Jakarta.
- Astuti, L. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan (Studi Pada Desa Asmorobangun Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri)*. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 3(11), 1886–1892.
- Frankel, Jeffrey A. "The Natural Resource Curse: A Survey" *National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 15836, NBER Program(s): Environment and Energy Economics*,
- March 2010. Haskarlianus Pasang, "Kajian Awal Dampak Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim di Indonesia", *Jurnal Analisis CSIS*, Vol. 40, No. 4, 2011
- Ismid Hadad, "Gerakan Lingkungan dan Advokasi Pembangunan Berkelanjutan" dalam Iwan Jaya Azis, Lydia M. Napitupulu, Arianto Patunru, dan Budi Reksosudarmo, *Pembangunan Berkelanjutan, Peran dan Kontribusi Emil Salim*, *Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta*,
- 2010 Iwan Jaya Azis, Lydia M. Napitupulu, Arianto Patunru, dan Budi Reksosudarmo *Pembangunan Berkelanjutan, Peran dan Kontribusi Emil Salim*, *Kepustakaan Populer Gramedia, Jaka Kementerian Lingkungan Hidup*,
- Widnyana, I. K., Proborini, M.W., Astiti, N.P.A., Kawuri, R., Defiani, M.R., Suanda, I.W. (2020). *Pertanian Berkelanjutan Sebuah Panduan Pendekatan Konsep dan Praktis*. Swasta Nulis: Denpasar Bali.
- Sinukaban, N. dan J, Hidrolitan. (2010) *Pengelolaan Lahan Pertanian Berbasis Pembangunan Berkelanjutan*
- Mulyana, D. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu. Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. *Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2010*, 2010
- Reza, M., Noer, M., Yonariza, Y., & Asmawi, A. (2019). *Hubungan Ikatan Anggota Kelompok Tani dengan Partisipasinya pada ProsesPerencanaan Penyuluhan Pertanian Tingkat Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota*. *Jurnal Penyuluhan*, 15(1), 17–23. <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v15i1.16355>
- Jonni Manwa, dkk. 2020. Daya Dukung Bioekologi Hutan dan lahan di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. *Jurnal Sylva Lestari*, Vol. 8 No.2. 2020

- Muhammad Fadly Abdina. 2019. Analisis Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Asahan. *Journal of Education Humaniora and Social Sciences*. Vol. 2, No. 2. 2019.
- Rani Utami. 2017. Influence of Land Area and Capital Strengthening Fund of Rural Economic Enterprises Toward Com Production in North Sumatera Province. *International Conference on Agricultural Environment and Food Security 1 (1)*, 8.
- Hendrixon Hatta, Udisubakti Ciptomulyo. 2019. Komoditas Unggulan Kluster Agroindustri Perkebunan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Manajemen dan Teknik Industri-Produksi*. Vol. XXI, No. 1. 2020.
- Rayuddin. 2010. *Pengembangan Kompetensi Agribisnis Petani Kakao Di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara*.
- Ambardi, Urbanus dan Prihawanoro, Socia (2002). *Pengembangan wilayah dan otonomi daerah*, Jakarta. Penerbit pusat kebijakan teknologi dan pengembangan wilayah.
- Didik J. Rachbini, 2001. *Ekonomi Politik dan Kebijakan*. Publik. Jakarta: PT Grasindo.
- Usya, N. 2006. Analisis Struktur Ekonomi dan Identifikasi Sektor Unggulan di Kabupaten Subang [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Tesis ini diterbitkan Bogor, Institut Pertanian Bogor.
- Febriandhika, I., & Kumiawan, T. (2019). Membingkai Konsep Pariwisata Yang Berkelanjutan Melalui Community-Based Tourism: Sebuah Review Literatur. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 50-56.
- INDONESIA, P. R. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10. TAHUN 2009. TENTANG KEPARIWISATAAN*.
- Miles, B. M., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis (Tjetjep Rohendi Rohidi Translation)*.
- Munandar, O., & Surdin, L. H. (2019). Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pemilik Usaha Pada Obyek Wisata Pantai Toronipa Kelurahan Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe. *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*, 5(1). 101-107
- Abdillah A.B.Y., Hamid, D. 2016. Dampak Pengembangan Pariwisata terhadap Kehidupan Masyarakat Lokal di Kawasan Wisata (Studi pada Masyarakat sekitar Wisata Wendit, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol 30 (1). Hal 74-78
- Aryani SW, Sunarti, Darmawan A. 2017. Analisis Dampak Pembangunan Pariwisata pada Aspek Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Wisata Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta). *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 49(2). Hal:142-146.

- Rusdin, (2016). Dampak Pengembangan Wisata Bahari Pantai Toronipa Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kelurahan Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari
- Badan pusat statistik. 2023. *Kabupaten Konawe dalam angka*. Kabupaten konawe
- Pemkab Konawe Serahkan Puluhan Bantuan Alat Tangkap untuk Nelayan Soropia (detiksultra.com)
- Ibrahim, I., Supamri, S., & Zainal, Z. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Peternak Rakyat Sapi Potong di Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian (J-SEP)*, 13(3), 307-315. <https://doi.org/10.19184/jsep.v13i3.1844>
- Indrayani, I., & Andri, A. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Temak Sapi Potong di Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Peternakan Indonesia (Indonesian Journal of Animal Science)*, 20(3), 151-159. <https://doi.org/10.25077/jpi.20.3.151-159.2018>
- Karimuna, S. R., Bananiek, S., Syafiuddin, S., & Al Jumiaty, W. (2020). Potensi pengembangan komoditas peternakan di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan Tropis*, 7(2), 110-118. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33772/jitro.v7i2.12215>
- Tambang Nikel Sulawesi: Peluang, Tantangan, dan Solusi Berkelanjutan - PT ICSA
- Candra Mustika (2018) "pengaruh ekspor minyak mentah batu bara dan gas alam terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertambangan di Indonesia"
- Ceceng Selegi (2018), "Dampak Aktivitas Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan"
- Griggs, D. 2013. From MDGs to SDGs: Key challenges and opportunities. Jerman: Monash Sustainability Institute. [http:// http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/3490griggs.pdf](http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/3490griggs.pdf)
- Pezzey, John. 1992. "Sustainability: An Interdisciplinary Guide." *Environmental Values* 1, no 4, The White Horse Press: Cambridge, UK.
- Michael Harris, 2000. *Human Resource management*.second edition. USA : Harcourt Brace & Company
- Heal, G. 1998. *Valuing the Future: Economic Theory and Sustainability*. Columbia University Press.New York.
- Fauzi.A. 2004, *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W.; Ismail, Nurhasan; Rustiadi, Ernan; Damai, Abdullah Aman, 2011, *Pengaturan Sumber Daya Alam Di Indonesia, Antara yang Tersurat dan Tersirat*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Keraf, A. Sonny, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.

LAMPIRAN: DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Persentase Seminar Awal Penelitian



Gambar 2. Peserta Seminar Awal dan Tim Peneliti



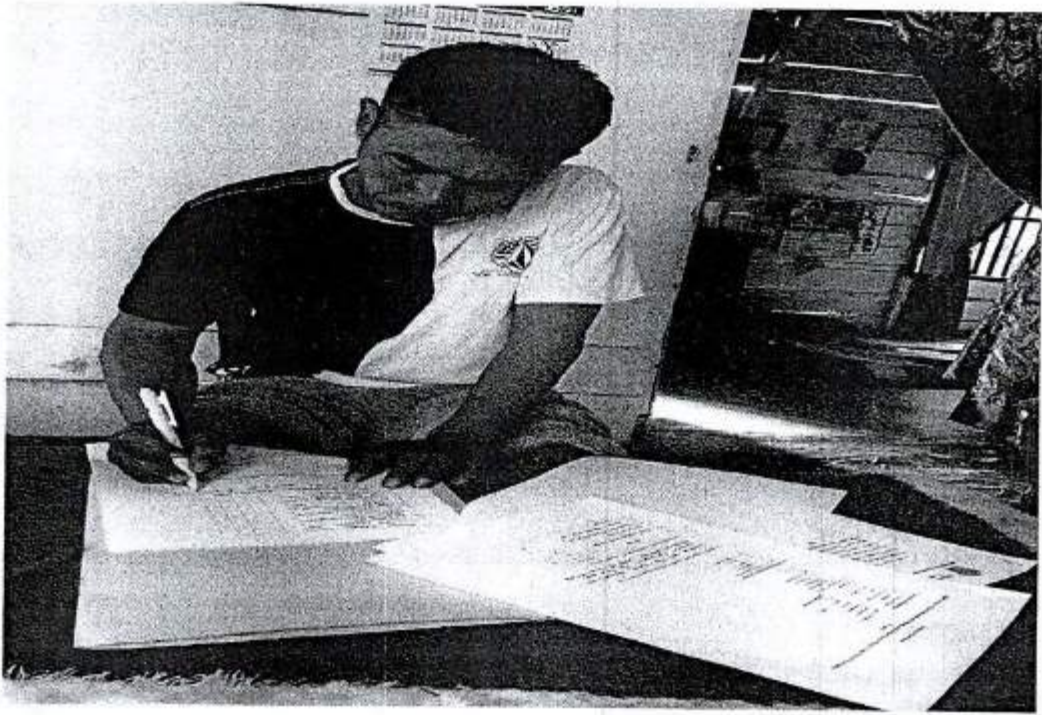
Gambar 3. Wawancara dengan Informan Penelitian di Kec. Morosi



Gambar 4. Wawancara Tim Peneliti: Dr. Harnina Ridwan, M.Si dengan Kades di Kecamatan Soropia.



Gambar 5. Wawancara Informan di Kecamatan Wonggeduku



Gambar 6. Pengisian Angket di Kecamatan Konawe



Gambar 7. Persentase Seminar Akhir



Gambar 8. Peserta Seminar Akhir dan Tim Peneliti